PT HOTEL FITRA INTERNATIONAL Tbk
(d/h PT HOTEL FITRA SYARIAH)
DAN ENTITAS ANAK

LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2020

DAN

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

PT HOTEL FITRA INTERNATIONAL Tbk (d/h PT HOTEL FITRA SYARIAH)
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2020

DAFTAR ISI

	Halaman
SURAT PERNYATAAN DIREKSI	
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	
LAPORAN KEUANGAN	
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian	1
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian	2
Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian	3
Laporan Arus Kas Konsolidasian	4
Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian	5 - 57

PT. HOTEL FITRA INTERNATIONAL, Tbk
A Jalan K.H. Abdul Halim No.88 - Majalengka, Jawa Barat 45418
T +6223 3829 2888 W fitrahotel.co.id

SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
PT.HOTEL FITRA INTERNATIONAL (d/h PT.HOTEL FITRA SYARIAH)
DAN ENTITAS ANAK
TANGGAL 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

Kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama	:	Joni Rizal
Alamat Kantor	:	Jl. K. H. Abdul Halim No. 88 Majalengka – Jawa Barat
Nomor Telephone.	:	0233-8292888
Jabatan	:	Direktur Utama

Menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian PT Hotel Fitra International Tbk (dh PT Hotel Fitra Syariah) dan entitas anak;
2. Laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan Entitas Anak telah disusun dan disajikan berdasarkan standar akuntansi keuangan di Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan Entitas Anak telah dimuat secara lengkap dan benar:
   b. Laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan Entitas Anak tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar. Dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Perusahaan dan Entitas Anak.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Majalengka, 23 April 2021
Atas Nama dan mewakili Direksi

PT HOTEL FITRA INTERNATIONAL Tbk

METERAI TEMPEL 10000 SEPULUH RIBU RUPIAH
61FAAJX052224797

Joni Rizal
Direktur

Drs. CHAERONI & REKAN
Registered Public Accountants
Management, Finance & Tax
Advisory Services
Ijin Usaha No. 9/KM.1/2007

Jl. Anggrek Nelimurni II/C - 5, Slipi, Jakarta Barat 11480 Indonesia
Telephone : +62-21532 1037 (Hunting)
Facsimile : +62-21535 6669
www.kap.chaeroni-rekan.com, Email : kap_mci@yahoo.com

No. : 00047/2.0713/AU.1/05/0163-1/1/IV/2021

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi
PT Hotel Fitra International Tbk dan Entitas Anak

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Hotel Fitra International Tbk dan Entitas Anak terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian per 31 Desember 2020, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung Jawab Manajemen

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung Jawab Auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasian. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Hotel Fitra International Tbk dan Entitas Anak tanggal 31 Desember 2020 serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang di Indonesia.

Penekanan suatu hal

Kami membawa perhatian ke Catatan 31 atas laporan keuangan konsolidasian terlampir yang menjelaskan bahwa pada tanggal 31 Desember 2020, Perusahaan dan entitas anak mengalami akumulasi defisit dan jumlah liabilitas jangka pendek melampaui jumlah aset lancar. Kondisi tersebut bersama hal-hal lain sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 31 atas laporan keuangan konsolidasian terlampir, mengindikasikan adanya suatu ketidakpastian material yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Perusahaan dan entitas anak untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Rencana manajemen Grup untuk mengatasi kondisi tersebut juga diungkapkan dalam Catatan 31 atas laporan keuangan konsolidasian. Opini kami tidak dimodifikasi sehubungan dengan hal tersebut.

KAP Drs. CHAERONI & REKAN
Ijin Usaha No.09/KM.1/2007

KANTOR AKUNTAN JAKARTA Drs. CHAERONI & REKAN

Drs. Moch. Chaeroni, Ak, CA, BKP, CPA.
NRAP : AP.0163

Jakarta, 23 April 2021

PT HOTEL FITRA INTERNATIONAL Tbk (d/h PT HOTEL FITRA SYARIAH)
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2020	2019
ASET			
Aset Lancar			
Kas dan setara kas	3h,3i,5,25	1.681.806.191	2.971.233.553
Piutang usaha	3h,3j,6,25	259.710.717	687.823.409
Piutang lain-lain		-	5.560.000
Persediaan	3k,7	51.014.992	85.246.318
Jumlah Aset Lancar		1.992.531.900	3.749.863.280
Aset Tidak Lancar			
Aset pajak tangguhan	3r,23	204.251.744	54.313.457
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp13.130.602.208 dan Rp8.772.837.585	3l,8	59.388.262.292	57.034.512.515
Jumlah Tidak Lancar		59.592.514.037	57.088.825.972
JUMLAH ASET		61.585.045.937	60.838.689.252
LIABILITAS DAN EKUITAS			
Liabilitas Jangka Pendek			
Utang usaha	3h,3o,9,25	1.236.173.633	124.719.369
Utang lain-lain	3h,12,25	1.488.768.289	79.892.732
Utang pajak	3r,10	58.736.678	155.534.107
Biaya yang masih harus dibayar	3h,11,25	1.092.347.277	916.219.676
Utang bank - bagian jatuh tempo dalam setahun	3h,15,25	2.700.000.000	3.925.000.000
Utang sewa pembiayaan - bagian jatuh tempo dalam setahun	3h,14,25	167.095.839	227.791.550
Utang pemegang saham	3h,3f,13	1.000.000.000	-
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		7.743.121.716	5.429.157.434
Liabilitas Jangka Panjang			
Utang bank	3h,15,25	23.713.100.000	17.246.500.000
Utang sewa pembiayaan	3h,14,25	8.856.944	175.952.783
Liabilitas imbalan kerja	3s,19	928.417.021	217.253.827
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang		24.650.373.965	17.639.706.610
Jumlah Liabilitas		32.393.495.681	23.068.864.044
Ekuitas			
Modal saham - nilai nominal Rp100 per saham			
Modal dasar - 1.000.000.000 saham			
Modal ditempatkan dan disetor – 600.000.000 saham	16	60.000.000.000	60.000.000.000
Tambahan modal disetor	17	(11.208.617.033)	(11.208.617.033)
Defisit		(19.599.908.175)	(11.021.658.226)
Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk		29.191.474.792	37.769.724.741
Kepentingan non-pengendali	18	75.464	100.467
Jumlah Ekuitas		29.191.550.256	37.769.825.208
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		61.585.045.937	60.838.689.252

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Konsolidasian secara keseluruhan

PT HOTEL FITRA INTERNATIONAL Tbk (d/h PT HOTEL FITRA SYARIAH)
DAN ENTITAS ANAK

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2020	2019
Pendapatan	3q,20	5.397.369.104	9.484.521.447
Beban pokok pendapatan	3q,21	(4.987.831.971)	(5.388.720.036)
Laba kotor		409.537.133	4.095.801.411
Beban usaha	3q,22	(7.005.924.071)	(7.353.718.265)
Pendapatan (beban) lain-lain			
Pendapatan jasa giro		14.696.649	73.492.649
Bunga pinjaman bank		(2.421.688.249)	(2.908.754.951)
Bunga sewa pembiayaan		(25.552.848)	(22.876.144)
Provisi bank		(19.818.700)	(31.384.000)
Administrasi bank		(6.865.000)	(8.841.200)
Bunga pinjaman lainnya		(4.116.667)	-
Pajak bunga		(1.813.966)	(2.193.138)
Lain-lain - net		379.003.939	2.080.029
Rugi sebelum pajak penghasilan		(8.682.541.781)	(6.156.393.609)
Beban pajak penghasilan	3r,23		
Pajak kini		-	-
Pajak tangguhan		140.281.440	26.098.449
Rugi bersih tahun berjalan		(8.542.260.341)	(6.130.295.160)
Penghasilan (rugi) komprehensif lain			
Pengukuran kembali imbalan pasti		(45.671.459)	(13.029.101)
Pajak atas penghasilan terkait		9.656.848	3.257.275
Rugi komprehensif tahun berjalan		(8.578.274.952)	(6.140.066.986)
Rugi tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:			
Pemilik entitas induk		(8.542.235.400)	(6.130.266.803)
Kepentingan non-pengendali		(24.941)	(28.356)
Rugi tahun berjalan		(8.542.260.341)	(6.130.295.160)
Rugi komprehensif yang dapat diatribusikan kepada:			
Pemilik entitas induk		(8.578.249.949)	(6.140.038.614)
Kepentingan non-pengendali		(25.003)	(28.372)
Rugi komprehensif tahun berjalan		(8.578.274.952)	(6.140.066.986)
Rugi per saham dasar	3u,24	(14,30)	(10,56)

PT HOTEL FITRA INTERNATIONAL Tbk (d/h PT HOTEL FITRA SYARIAH) DAN ENTITAS ANAK

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL

31 DESEMBER 2020

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Modal saham	Tambahan modal disetor	Defisit	Ekuitas yang dapat diatribusikan entitas induk	Kepentingan non pengendali	Jumlah ekuitas
Saldo per 31 Desember 2018	38.000.000.000	(9.484.907.071)	(4.881.613.552)	23.633.479.377	122.778	23.633.602.155
Penambahan modal melalui penawaran umum	22.000.000.000	440.000.000	-	22.440.000.000	-	22.440.000.000
Biaya emisi saham	-	(2.163.709.962)	-	(2.163.709.962)	-	(2.163.709.962)
Rugi bersih tahun berjalan	-	-	(6.130.266.803)	(6.130.266.803)	(28.356)	(6.130.295.160)
Rugi komprehensif lain	-	-	(9.771.811)	(9.771.811)	(15)	(9.771.826)
Pengaruh perubahan kepemilikan atas entitas anak	-	-	(6.061)	(6.061)	6.061	-
Saldo per 31 Desember 2019	60.000.000.000	(11.208.617.033)	(11.021.658.226)	37.769.724.741	100.467	37.769.825.208
Rugi bersih tahun berjalan	-	-	(8.542.235.400)	(8.542.235.400)	(24.941)	(8.542.260.341)
Rugi komprehensif lain	-	-	(36.014.549)	(36.014.549)	(62)	(36.014.611)
Saldo per 31 Desember 2020	60.000.000.000	(11.208.617.033)	(19.599.908.175)	29.191.474.792	75.464	29.191.550.256

PT HOTEL FITRA INTERNATIONAL Tbk (d/h PT HOTEL FITRA SYARIAH)
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	2020	2019
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Penerimaan kas dari pelanggan	7.234.357.353	8.961.803.269
Pembayaran kas kepada pemasok dan pihak ketiga	(2.384.805.123)	(3.869.123.214)
Pembayaran kas kepada karyawan	(2.950.986.718)	(4.297.438.250)
Penerimaan (pembayaran):		
Penghasilan bunga	12.882.683	71.299.511
Beban keuangan	(2.578.041.464)	(2.971.856.295)
Beban pajak	(404.132.082)	28.005.289
Operasional lainnya	379.003.939	2.080.029
Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas operasi	(691.721.412)	(2.075.229.661)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Perolehan aset tetap	(6.711.514.400)	(17.060.895.780)
Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi	(6.711.514.400)	(17.060.895.780)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Perolehan dari penawaran umum saham perdana	-	22.440.000.000
Biaya emisi saham	-	(2.163.709.962)
Pembayaran utang bank	(900.000.000)	(192.638.556)
Penerimaan utang bank	6.241.600.000	2.138.400.000
Pembayaran utang sewa pembiayaan	(227.791.550)	(3.524.402.687)
Penerimaan utang pihak berelasi	1.000.000.000	-
Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan	6.113.808.450	18.697.648.795
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS DAN SETARA KAS	(1.289.427.362)	(438.476.646)
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	2.971.233.553	3.409.710.199
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	1.681.806.191	2.971.233.553

1. UMUM

a. Pendirian Perusahaan

PT Hotel Fitra International (dahulu PT Hotel Fitra Syariah) ("Perusahaan") didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 34 tanggal 24 Januari 2014 dibuat oleh Notaris Muhammad Hanafi S.H, notaris di Jakarta dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0021306.AH.01.09.Tahun 2014 tanggal 12 Maret 2014.

Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami perubahan, diantaranya berdasarkan:

- Akta No. 26 tanggal 28 Mei 2018 oleh notaris Rudy Siswanto S.H., yang berkedudukan di Jakarta Utara, mengenai pernyataan keputusan rapat. Akta perubahan ini telah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0080364.AH.01.11.Tahun 2018, tanggal 08 Juni 2018. Perubahan anggaran dasar tersebut antara lain berkaitan dengan; a) perubahan status Perusahaan yang semula Perusahaan Tertutup menjadi Perusahaan Terbuka, b) perubahan jangka waktu berdirinya Perusahaan menjadi jangka waktu tidak terbatas, c) penurunan nilai nominal saham dari semula Rp100.000 menjadi Rp100, d) rencana Perusahaan untuk melakukan penawaran umum perdanan saham-saham Perusahaan melalui pasar modal yang disertai dengan penerbitan Waran Seri-I, e) menyetujui perubahan susunan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi.

- Akta No. 50 tanggal 26 Desember 2018 oleh notaris Rudy Siswanto S.H., yang berkedudukan di Jakarta Utara, mengenai pernyataan keputusan edaran para pemegang saham. Akta perubahan ini telah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0177930.AH.01.11.Tahun 2018, tanggal 27 Desember 2018. Perubahan anggaran dasar tersebut antara lain berkaitan dengan; a) menyetujui untuk mengalihkan/mengoperkan hak-hak atas saham Perusahaan milik PT Gloria Inti Nusantara, b) meningkatkan modal ditempatkan/disetor dalam Perusahaan menjadi sebanyak 380.000.000 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp38.000.000.000.

- Akta Notaris No. 17 tanggal 14 Februari 2019 dari Rudy Siswanto, S.H., Notaris di Jakarta Utara, mengenai keputusan para pemegang saham. Akta perubahan ini telah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0025225.AH.01.11.Tahun 2019, tanggal 14 Februari 2019. Perubahan anggaran dasar tersebut antara lain berkaitan dengan; a) Menyetujui untuk mengubah status perseroan yang semula perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka, sehingga selanjutnya nama perseroan menjadi PT Hotel Fitra International Tbk, b) Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana saham-saham Perseroan melalui Pasar Modal (Initial Public Offering) yang disertai dengan penerbitan sebanyak-banyaknya 220.000.000 saham atau 36,67% dari total modal ditempatkan dan disetor setelah Penawaran Umum Perdana Saham yang merupakan saham baru dengan nilai nominal Rp100, c) Menyetujui rencana Perusahaan menerbitkan dan mengeluarkan hak opsi pemilikan saham baru kepada karyawan dan manajemen Perusahaan melalui program Employee and Management Stock Ownership Programe (EMSOP) dengan mengalokasikan saham baru kepada karyawan sebanyak-banyaknya 132.000.000 saham biasa dalam IPO yang ditawarkan kepada karyawan dan manajemen Perusahaan, d) Menyetujui melepaskan dan mengesampingkan hak masing-masing pemegang saham perseroan untuk mengambil bagian terlebih dahulu (right of first refusal) atas saham baru yang disyaratkan dalam Anggaran Dasar perseroan,

1. UMUM (Lanjutan)

a. Pendirian Perusahaan (Lanjutan)

Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami perubahan, diantaranya berdasarkan: (lanjutan)

e) Menyetujui rencana perseroan untuk melakukan pencatatan saham-saham perseroan di Bursa Efek Indonesia, f) Perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris perseroan yang baru yaitu dengan memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Komisaris perseroan yang lama dengan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya serta mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru, g) Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak subtitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka efektifnya dan/atau pelaksanaan keputusan-keputusan sebagaimana hal tersebut di atas, h) Memberikan kuasa kepada Direksi Perusahaan untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan IPO, i) Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan dalam akta Notaris tersendiri mengenal kepastian jumlah saham dalamm rangka Penawaran Umum dan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan, setelah Penawaran Umum selesai dilaksanakan dan nama-nama pemegang Saham Perseroan tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan Perseroan telah mencatatkan sahamnya dalam Bursa Efek, j) Mengubah seluruh anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Bapepam dan LK No. IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik, juncto Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka juncto Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik dan sekaligus menyusun kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

- Akta Notaris No. 15 tanggal 27 Maret 2019 dari Rudy Siswanto, S.H., Notaris di Jakarta Utara, mengenai keputusan para pemegang saham. Akta perubahan ini telah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0052140.AH.01.11.Tahun 2019, tanggal 28 Maret 2019 antara lain menyetujui untuk menambah kegitan usaha Perseroan yaitu aktivitas Perusahaan holding.

- Akta Notaris No. 05 tanggal 18 Juni 2019 dari Rudy Siswanto, S.H., Notaris di Jakarta Utara, mengenai kepastian jumlah dan perubahan anggaran dasar dalam rangka penawaran umum perdana. Akta perubahan ini telah mendapat persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hal Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0095307.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 20 Juni 2019. Perubahan anggararan terakhir tersebut Antara lain berkaitan meningkatkan modal ditempatkan/disetor dalam Perusahaan menjadi sebanyak 600.000.000 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp60.000.000.000.

Berdasarkan pasal 3 anggaran dasar, maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang pembangunan dan akomodasi, perhotelan, pariwisata, travel dan tour. Pada saat ini, Perusahaan bergerak dalam bidang investasi dan merupakan induk perusahaan dari beberapa entitas anak.

Pemegang saham Pengendali Perseroan adalah PT Gloria Inti Nusantara di mana ultimate shareholder dari PT Gloria Inti Nusantara adalah Go Ronny Nugroho. Perseroan tidak memiliki perjanjian yang dapat mengakibatkan perubahan Pengendali.

1. UMUM (Lanjutan)

a. Pendirian Perusahaan (Lanjutan)

Perusahaan berdomisili di Jl. KH. Abdul Halim No. 88 RT. 005 RW. 008, Kelurahan Majalengka Kulon, Kecamatan Majalengka, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat.

b. Penawaran Umum Saham Entitas Induk

Entitas Induk telah menerima Surat Pernyataan Efektif dari Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal atas nama Dewan Komisaris Otorisasi Jasa Keuangan (OJK) dengan surat No. S-60/D.04/2019 tanggal 27 Mei 2019 untuk melakukan penawaran umum saham kepada masyarakat sebanyak 220.000.000 saham dengan nilai nominal Rp100 per saham dengan harga penawaran Rp102 per saham. Saham-saham tersebut seluruhnya telah dicatatkan pada Bursa Efek tanggal 11 Juni 2019.

c. Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan

Berdasarkan akta No. 05 dari notaris Rudy Siswanto S.H., notaris di Jakarta Utara, tanggal 16 Juni 2019, susunan Dewan Komisaris dan Direksi per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris	
Komisaris	: Ny. Siti Rahayu
Komisaris Independen	: Ny. Ida Haerani
Dewan Direksi	
Direktur Utama	: Tn. Joni Rizal
Direktur	: Tn. Tomi Tris
Direktur	: Tn. Sukino

Dewan Komisaris dan Direksi menerima kompensasi yang ditentukan oleh pemegang saham pada saat RUPS tahunan, dan dibayarkan bulanan. Dewan Komisaris dan Direksi menerima kompensasi yang besarnya utuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sekitar Rp360.000.000 dan tanggal 31 Desember 2019 sekitar Rp360.000.000.

Berdasarkan Surat keputusan No. 05/SK/HFI/18 pada tanggal 5 Juni 2018, Entitas induk menetapkan Tomi Tris sebagai Sekretaris Entitas induk.

Berdasarkan Surat keputusan No. 01/SK/HFI/18 pada tanggal 5 Juni 2018, Entitas induk menetapkan Bayu Prembakasih sebagai Ketua Unit Audit Internal.

Berdasarkan Surat keputusan No. 02/SK/HFI/18 pada tanggal 5 Juni 2018, Entitas induk menetapkan anggota komite audit Entitas induk adalah sebagai berikut:

Ketua	: Ida Haerani, S.H., M.H
Anggota	: Evi Rosanah
	: Siswati Ningsih

1. UMUM (Lanjutan)

c. Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan (Lanjutan)

Komite Nominasi dan Remunerasi

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 03/SK/HFI/19 pada tanggal 4 Februari 2019, Perseroan telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan, susunan keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi adalah sebagai berikut:

Ketua	: Ida Haerani, S.H., M.H
Anggota	: Sii Rahayu
	: Rini Atmaja

Pada tanggal 31 Desember 2020 jumlah karyawan sebanyak 59 orang (32 karyawan tetap, 19 karyawan kontrak serta 8 karyawan harian) dan tanggal 31 Desember 2019 jumlah karyawan sebanyak 77 orang (27 karyawan tetap, 22 karyawan kontrak serta 28 karyawan harian).

d. Entitas Anak yang Dikonsolidasi

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, Entitas Anak yang dikonsolidasikan dengan persentase kepemilikan secara langsung lebih dari 50% adalah sebagai berikut:

Kepemilikan langsung

Entitas anak	Persentase pemilikan		Jumlah aset	
	2020	2019	2020	2019
PT Fitra Amanah Wisata	99,9600%	99,9600%	22.745.672	25.658.572
PT Bumi Majalengka Permai	99,9998%	99,9998%	60.660.360	59.728.634

	Lokasi	Mulai kegiatan operasi
PT Fitra Amanah Wisata	Majalengka	-
PT Bumi Majalengka Permai	Majalengka	2017

PT Bumi Majalengka Permai

PT Bumi Majalengka Permai ("Perusahaan") didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 02 tanggal 09 Desember 2013 dibuat oleh Notaris Muhammad Hanafi S.H, notaris di Jakarta dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-02739.AH.01.01.Tahun 2014 tanggal 20 Januari 2014. Akta Perusahaan telah mengalami perubahan, terakhir dengan akta No. 12 tanggal 20 Juni 2019 oleh notaris Rudy Siswanto SH, mengenai pernyataan keputusan para pemegang saham secara edaran. Akta perubahan ini telah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0096462.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 21 Juni 2019.

1. UMUM (Lanjutan)

   d. Entitas Anak yang Dikonsolidasi

   PT Bumi Majalengka Permai (lanjutan)

   Berdasarkan pasal 3 anggaran dasar, maksud dan tujuan Perseroan adalah Menjalankan usaha dalam bidang jasa penyedian penginapan (hotel dan transit hotel), jasa pengelolaan hotel meliputi aspek pemasaran, operasional dan pemeliharaan hotel, baik berupa piranti lunak maupun piranti keras, perdagangan, pembangunan (kontraktor) guna memborong segala pekerjaan bangunan dan pekerjaan umum, industri, pengangkutan darat, percetakan dan perbengkelan.

   Perusahaan berdomisili di Jl. KH. Abdul Halim No. 88 RT. 005 RW. 008, Kelurahan Majalengka Kulon, Kecamatan Majalengka, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat.

   PT Fitra Amanah Wisata

   PT Fitra Amanah Wisata ("Perusahaan") didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 64 tanggal 27 November 2017 dibuat oleh Notaris Benediktus Andy Widyanto S.H., notaris di Tangerang Selatan dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0054083.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 29 November 2017.

   Akta Perusahaan telah mengalami perubahan, terakhir dengan akta No. 24 dari notaris Rudy Siswanto, SH., notaris di Jakarta Utara, tanggal 24 April 2018, mengenai pernyataan keputusan rapat, Akta perubahan ini telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0060396.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 27 April 2018.

   Berdasarkan pasal 3 anggaran dasar, maksud dan tujuan Perseroan adalah Menjalankan usaha dalam bidang jasa perjalanan wisata, penyelenggaraan dan penjualan paket wisata yang dijual, penyediaan layanan pramuwisata, penyediaan angkutan wisata, pemesanan akomodasi, restoran, tempat konvensi, tiket penjualan seni budaya, pengurusan dokumen perjalanan, visa, melakukan penyelenggaraan ibadah agama dan perjalanan insentif.

   Perusahaan berdomisili di Jl. KH. Abdul Halim No. 88 RT. 005 RW. 008, Kelurahan Majalengka Kulon, Kecamatan Majalengka, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat.

2. PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ("PSAK") DAN INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ("ISAK") BARU DAN REVISI

   a. Standar (SAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang Diterbitkan dan Berlaku Efektif dalam Tahun Berjalan (pada atau setelah 1 Januari 2020)

   Dalam tahun berjalan, Grup telah menerapkan standar akuntansi keuangan ("SAK") dan interpretasi standar akuntansi keuangan ("ISAK") baru dan revisi termasuk pengesahan amandemen dan penyesuaian tahunan yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia yang dianggap relevan dengan kegiatan operasinya dan mempengaruhi laporan keuangan berlaku efektif untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2020.

2. PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ("PSAK") DAN INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ("ISAK") BARU DAN REVISI (Lanjutan)

   a. Standar (SAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang Diterbitkan dan Berlaku Efektif dalam Tahun Berjalan (pada atau setelah 1 Januari 2020) (lanjutan)

   SAK dan ISAK baru dan revisi termasuk pengesahan amandemen dan penyesuaian tahunan yang berlaku efektif dalam tahun berjalan adalah sebagai berikut:

   - Amandemen PSAK 1 dan PSAK 25: Definisi Material. Amandemen ini menjelaskan definisi material dengan tujuan untuk menyelaraskan definisi yang digunakan dalam kerangka konseptual dan beberapa PSAK yang relevan. Selain itu, juga memberikan pedoman yang lebih jelas mengenai definisi material dalam rangka mengurangi pengungkapan berlebihan akibat adanya perubahan threshold definisi material.
   - Amandemen PSAK 15 "Investasi Pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama tentang Kepentingan Jangka Panjang pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama". Amandemen PSAK 15 menambahkan paragraf 14A sehingga mengatur bahwa Entitas juga menerapkan PSAK 71 atas instrumen keuangan pada Entitas asosiasi atau ventura bersama di mana metode ekuitas tidak diterapkan. Ini termasuk kepentingan jangka panjang yang secara substansi membentuk bagian investasi bagian investasi neto Perusahaan pada Entitas asosiasi atau ventura bersama sebagaimana dimaksud dalam PSAK 15 paragraf 38.
   - Amandemen PSAK 22: Definisi Bisnis. Amandemen ini dikeluarkan untuk membantu Perusahaan menentukan apakah serangkaian aktivitas dan aset yang diakuisisi adalah merupakan bisnis atau bukan. Mereka mengklarifikasi persyaratan minimum untuk bisnis, menghapus penilaian apakah pelaku pasar mampu mengganti elemen yang hilang, menambahkan panduan untuk membantu Entitas menilai apakah proses akusisi bersifat substantif, mempersempit definisi bisnis dan output, dan memperkenalkan pengujian konsentrasi nilai wajar opsional.
   - Amandemen PSAK 62 "Kontrak Asuransi - Penerapan PSAK 71: Instrumen Keuangan dengan PSAK 62: Kontrak Asuransi".

     Amandemen ini memberikan 2 (dua) pendekatan yang bersifat opsional bagi penanggung, yaitu:
     a. Pendekatan penundaan: pengecualian sementara dari penerapan PSAK 71 kepada Perusahaan yang aktivitas utamanya adalah menerbitkan kontrak asuransi sebagaimana dalam ruang lingkup PSAK 62 (yang berlaku di tingkat Perusahaan pelapor); dan
     b. Pendekatan berlapis: memungkinkan Perusahaan untuk mereklasifikasi beberapa pendapatan atau beban yang timbul dari aset keuangan tertentu dari laba rugi ke pendapatan komprehensif lain.
   - Amandemen PSAK 71 "Instrumen Keuangan tentang Fitur Percepatan Pembayaran dengan Kompensasi Negatif". Amandemen PSAK 71 mengubah paragraf PP4.1.11 (b) dan PP4.1.12 (b), dan menambahkan paragraf PP4.1.12A untuk mengatur aset keuangan dengan fitur pembayaran yang dipercepat yang dapat mengakibatkan kompensasi negatif memenuhi kualifikasi karena arus kas kontraktual hanya berasal dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.
   - PSAK 72 "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan", PSAK 72 menetapkan kerangka kerja yang komprehensif untuk menentukan bagaimana, kapan dan jumlah pendapatan dapat diakui. PSAK 72 memperkenalkan model lima langkah untuk penentuan dan pengakuan pendapatan yang akan diterapkan pada semua kontrak dengan pelanggan. PSAK ini juga memberikan pedoman khusus yang mengharuskan jenis biaya tertentu untuk memperoleh dan atau memenuhi suatu kontrak untuk dikapitalisasi dan diamortisasi secara sistematis mengacu pada pengalihan barang dan jasa kepada pelanggan. PSAK 72 ini menggantikan PSAK 23 "Pendapatan", PSAK 34 "Kontrak Konstruksi", PSAK 44 "Akuntansi Aktivitas Pengembangan Real Estat", ISAK 10 "Program Loyalitas Pelanggan", ISAK 21 "Perjanjian Konstruksi Real Estat" dan ISAK 27 "Pengalihan Aset Dari Pelanggan ".

2. PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ("PSAK") DAN INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ("ISAK") BARU DAN REVISI (Lanjutan)

a. Standar (SAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang Diterbitkan dan Berlaku Efektif dalam Tahun Berjalan (pada atau setelah 1 Januari 2020) (lanjutan)

SAK dan ISAK baru dan revisi termasuk pengesahan amandemen dan penyesuaian tahunan yang berlaku efektif dalam tahun berjalan adalah sebagai berikut: (lanjutan)

- PSAK 73 "Sewa", PSAK 73 mengatur prinsip-prinsip dasar pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan sewa dan mensyaratkan penyewa untuk mengukur semua sewa menggunakan model akuntansi tunggal yang serupa dengan akuntansi untuk sewa pembiayaan menurut PSAK 30. PSAK 73 mengatur dua pengecualian untuk penyewa yang terkait dengan model akuntansi, yaitu untuk sewa dengan aset bernilai rendah dan sewa dengan jangka waktu 12 bulan atau kurang. Pada saat dimulainya masa sewa, penyewa mengakui kewajiban membayar sewa dan aset yang mewakili hak untuk menggunakan aset yang mendasari selama masa sewa. Penyewa juga akan secara terpisah mengakui beban bunga atas liabilitas sewa dan beban penyusutan aset sewaan. Akuntansi pesewa berdasarkan PSAK 73 secara substansial tidak berubah dari akuntansi sebagaimana diatur dalam PSAK 30. Pesewa akan terus mengklasifikasikan semua sewa berdasarkan prinsip klasifikasi sebagaimana diatur dalam PSAK 30. PSAK 73 menggantikan PSAK 30 "Sewa", dan interpretasinya berdasarkan ISAK 8 "Menentukan Apakah Suatu Perjanjian Mengandung Sewa", ISAK 23 "Sewa Operasi - Insentif", ISAK 24 "Evaluasi Substansi Beberapa Transaksi yang Melibatkan Sewa Dalam Bentuk Hukum" dan ISAK 25 "Hak Atas Tanah".

- ISAK 35 "Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba". ISAK 35 mengatur ruang lingkup penyajian laporan keuangan Entitas berorientasi nonlaba tanpa memandang bentuk hukum Entitas. Interpretasi ini juga dapat diterapkan oleh Entitas yang berorientasi nonlaba yang menggunakan Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Non Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). ISAK 35 menggantikan PSAK 45 "Penyajian Laporan Keuangan Entitas Nirlaba" berdasarkan PPSAK 13 tentang Pencabutan PSAK 45 "Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba".

b. Standar (SAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang Diterbitkan Namun Belum Berlaku Efektif Dalam Tahun Berjalan

- PSAK 74 "Kontrak Asuransi". Kontrak asuransi mengharuskan Entitas untuk mengidentifikasi portofolio kontrak asuransi. Portofolio terdiri dari kontrak yang memiliki risiko serupa dan dikelola bersama. Entitas membagi portofolio kontrak asuransi yang diterbitkan, minimal, ke dalam kelompok kontrak yang memberatkan pada pengakuan awal, kelompok kontrak pada pengakuan awal tidak memiliki kemungkinan signifikan untuk kemudian menjadi kontrak yang merugi, dan kelompok kontrak yang tersisa dalam portofolio.

  PSAK 74 juga mengatur bahwa kelompok kontrak asuransi diukur pada nilai total arus kas pemenuhan dan margin jasa kontraktual. Arus kas kepatuhan mencakup estimasi arus kas masa depan dan penyesuaian untuk mencerminkan nilai waktu uang dan risiko keuangan yang terkait dengan arus kas masa depan, serta penyesuaian terhadap risiko non-keuangan. Pendekatan ini dimodifikasi untuk mengukur grup kontrak reasuransi yang dimiliki dan grup kontrak asuransi dengan fitur partisipasi diskresi. Namun, Entitas dapat menggunakan pendekatan alokasi premi untuk mengukur kontrak asuransi jika kontrak tersebut memenuhi kriteria tertentu.

  PSAK 74 juga mensyaratkan Entitas untuk memisahkan jumlah yang diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain ke dalam hasil jasa asuransi yang terdiri dari pendapatan asuransi dan biaya jasa asuransi, dan pendapatan atau beban keuangan.

2. PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ("PSAK") DAN INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ("ISAK") BARU DAN REVISI (Lanjutan)

b. Standar (SAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang Diterbitkan Namun Belum Berlaku Efektif Dalam Tahun Berjalan (lanjutan)

Pendapatan asuransi dan biaya jasa asuransi yang disajikan dalam laporan laba rugi tidak termasuk komponen investasi. Pendapatan asuransi adalah total perubahan kewajiban untuk sisa periode pertanggungan dalam periode yang berkaitan dengan jasa yang pembayarannya diharapkan oleh Entitas. PSAK 74 ini akan menggantikan PSAK 62 "Kontrak Asuransi".

Beberapa dari SAK dan ISAK termasuk amandemen dan penyesuaian tahunan yang berlaku dalam tahun berjalan dan relevan dengan kegiatan Grup telah diterapkan sebagaimana dijelaskan dalam "Ikhtisar Kebijakan Akuntansi yang Penting".

Beberapa SAK dan ISAK lainnya yang tidak relevan dengan kegiatan Grup atau mungkin akan mempengaruhi kebijakan akuntansinya dimasa depan sedang dievaluasi oleh manajemen potensi dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar-standar ini terhadap laporan keuangan konsolidasian.

Penerapan Standar Akuntansi Keuangan baru dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan baru dan revisi yang telah diterbitkan diatas, dan yang berlaku efektif pada tahun buku 1 Januari 2020 tidak berdampak signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian Grup.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi diterapkan secara konsisten dalam penyajian laporan keuangan konsolidasian kecuali bagi penerapan beberapa SAK baru dan yang telah direvisi dan berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2020, yaitu sebagai berikut:

a. Pernyataan Kepatuhan

Laporan keuangan konsolidasian disusun dan disajikan menggunakan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yang mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan Peraturan OJK No. VIII.G.7 tentang "Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik".

b. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan konsolidasian disusun sesuai dengan PSAK No. 1 (Revisi 2013), "Penyajian Laporan Keuangan", termasuk PSAK No.1 (Amandemen 2015), "Penyajian Laporan Keuangan tentang Prakarsa Pengukapan". PSAK revisi ini mengubah pengelompokkan item-item yang disajikan dalam penghasilan komprehensif lain (OCI). Item-item yang akan direklasifikasi ke laba rugi akan disajikan terpisah dari item-item yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi. Penerapan PSAK ini hanya berakibat pada penyajian saja dan tidak berdampak pada posisi keuangan dan kinerja Kelompok Usaha.

Laporan keuangan konsolidasian disusun berdasarkan konsep harga perolehan (historical cost) menggunakan dasar akrual, kecuali untuk laporan arus kas. Beberapa akun disajikan dengan pengukuran lain sebagaimana dijelaskan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

b. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan (lanjutan)

Laporan arus kas konsolidasian disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam laporan keuangan konsolidasian adalah Rupiah (Rp) yang juga merupakan mata uang fungsional Kelompok Usaha.

Ketika Grup menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara restrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan atau ketika Grup mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya maka entitas menyajikan kembali laporan keuangan konsolidasian pada awal periode komparatif yang disajikan.

Entitas anak

Entitas anak adalah seluruh entitas (termasuk entitas bertujuan khusus) dimana Perusahaan memiliki kekuasaan untuk mengatur kebijakan keuangan dan operasional atasnya, biasanya melalui kepemilikan lebih dari setengah hak suara. Keberadaan dan dampak dari hak suara potensial yang saat ini dapat dilaksanakan atau dikonversi, dipertimbangkan ketika menilai apakah Perusahaan mengendalikan entitas lain.

Perusahaan juga menilai keberadaan pengendalian ketika Perusahaan tidak memiliki lebih dari 50% hak suara namun dapat mengatur kebijakan keuangan dan operasional secara de-facto. Pengendalian de-facto dapat timbul ketika jumlah hak suara yang dimiliki Perusahaan, secara relatif terhadap jumlah dan penyebaran kepemilikan hak suara pemegang saham lain memberikan Perusahaan kemampuan untuk mengendalikan kebijakan keuangan dan operasi, serta kebijakan lainnya.

c. Prinsip-prinsip Konsolidasian

Kelompok Usaha menerapkan PSAK 65 "Laporan Keuangan Konsolidasian" secara retrospektif. PSAK 65 menggantikan persyaratan laporan keuangan konsolidasian dalam PSAK (Revisi 2009) "Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Keuangan Tersendiri" dan menggantikan ISAK 7 "Konsolidasi Entitas Bertujuan Khusus ".

PSAK ini mensyaratkan entitas induk (entitas yang mengendalikan satu atau lebih entitas lain) untuk menyajikan laporan keuangan konsolidasian. Investor menentukan apakah investor merupakan entitas induk dengan menilai apakah investor mengendalikan satu atau lebih investee. Investor mempertimbangkan seluruh fakta dan keadaan yang relevan ketika menilai apakah investor mengendalikan investee.

Investor mengendalikan investee ketika investor terekspos atau memiliki hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan investee dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui kekuasaannya atas investee.

Dengan demikian, investor mengendalikan investee jika dan hanya jika, investor memiliki seluruh hal berikut ini:

a. kekuasaan atas investee (misalnya hak yang ada saat ini yang memberi investor tersebut kemampuan kini untuk mengarahkan aktivitas relevan investee);
b. eksposur atau hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan investee; dan
c. kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas investee untuk mempengaruhi jumlah imbal hasil.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

c. Prinsip-prinsip Konsolidasian (lanjutan)

Pada umumnya, mayoritas hak suara menghasilkan pengendalian. Ketika Entitas memiliki kurang dari mayoritas hak suara, atau serupa atas investee, investor mempertimbangkan semua fakta dan keadaan yang relevan dalam menilai apakah memiliki kekuasaan atas investee, termasuk:

a. pengaturan kontraktual dengan pemegang suara lainnya dari investee;
b. hak-hak yang timbul dari pengaturan kontraktual;
c. hak suara dan hak suara potential investor

Investor menilai kembali apakah investor mengendalikan investee jika fakta dan keadaan mengindikasikan adanya perubahan terhadap satu atau lebih dari tiga elemen pengendalian.

Prosedur Konsolidasi

Laporan keuangan konsolidasian:

- menggabungkan item sejenis seperti aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban dan arus kas dari entitas induk dengan entitas anaknya;
- menghapus (mengeliminasi) jumlah tercatat dari investasi entitas induk di setiap entitas anak dan bagian entitas induk pada ekuitas setiap entitas anak;
- mengeliminasi secara penuh aset dan liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban dan arus kas dalam intra kelompok usaha yang berkaitan dengan transaksi antara entitas-entitas dalam Kelompok Usaha.

Entitas memasukkan penghasilan dan beban entitas anak dalam laporan keuangan konsolidasian dari tanggal diperolehnya pengendalian sampai dengan tanggal ketika entitas kehilangan pengendalian atas entitas anak. Penghasilan dan beban entitas anak didasarkan pada jumlah aset dan liabilitas yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian pada tanggal akuisisi.

Kepentingan Nonpengendali (NCI)

Entitas dan entitas anaknya disyaratkan untuk mempunyai kebijakan akuntansi dan tanggal pelaporan yang sama, atau konsolidasian berdasarkan informasi keuangan tambahan yang dibuat entitas anak. Entitas induk menyajikan NCI di laporan posisi keuangan konsolidasiannya dalam ekuitas, terpisah dari ekuitas pemilik entitas. Entitas mengatribusikan laba rugi dan setiap komponen dari penghasilan komprehensif lain kepada pemilik entitas induk dari kelompok usaha dan NCI, meskipun hal tersebut mengakibatkan NCI memiliki saldo deficit atas dasar kepentingan kepemilikan sekarang.

Perubahan Proporsi Kepemilikan

Perubahan kepemilikan entitas dalam entitas anak yang tidak menghasilkan kehilangan pengendalian di entitas anak adalah transaksi ekuitas (yaitu transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik). Ketika proporsi ekuitas yang dimiliki oleh NCI berubah, entitas menyesuaikan jumlah tercatat kepentingan pengendali dan NCI untuk mencerminkan perubahan kepemilikan relatifnya dalam entitas anak. Entitas tersebut mengakui secara langsung dalam ekuitas setiap perbedaan antara jumlah tercatat NCI yang disesuaikan dan nilai wajar imbalan yang dibayar atau diterima, dan mengatribusikannya kepada pemilik entitas induk.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

c. Prinsip-prinsip Konsolidasian (lanjutan)

Kehilangan Pengendalian

Jika entitas induk kehilangan pengendalian atas entitas anak, maka entitas induk:

a. menghentikan pengakuan aset dan liabilitas entitas anak terdahulu dari laporan posisi keuangan konsolidasian;
b. mengakui sisa investasi apapun pada entitas anak terdahulu pada saat hilangnya pengendalian dan selanjutnya mencatat sisa investasi tersebut dan setiap jumlah terutang oleh atau kepada entitas anak terdahulu sesuai dengan PSAK lain yang relevan. Sisa investasi tersebut diukur kembali dan pengukuran kembali tesebut dianggap sebagai nilai wajar pada saat pengakuan awal aset keuangan, atau, jika sesuai, biaya perolehan pada saat pengakuan awal investasi pada entitas asosiasi atau ventura bersama;
c. mengakui keuntungan atau kerugian terkait dengan hilangnya pengendalian yang dapat diatribusikan pada kepentingan pengendali terdahulu.

Entitas Investasi – Pengecualian Konsolidasi

Entitas investasi tidak mengonsolidasi entitas anaknya atau menerapkan PSAK 22 (Revisi 2009) "Kombinasi Bisnis" ketika entitas tersebut memperoleh pengendalian atas entitas lain. Ketika entitas menjadi, atau berhenti, menjadi entitas investasi, entitas menerapkan secara prospektif perubahan statusnya dari tanggal terjadinya perubahan status tersebut.

Entitas investasi adalah entitas yang:

a. memperoleh dana dari satu atau lebih investor dengan tujuan memberikan investor tersebut jasa manajemen investasi;
b. menyatakan komitmen kepada investor bahwa tujuan bisnisnya adalah untuk menginvestasikan dana yang semata-mata untuk memperoleh imbal hasil dari kenaikan nilai modal, penghasilan investasi, atau keduanya; dan
c. mengukur dan mengevaluasi kinerja dari seluruh investasinya yang substansial berdasarkan pada nilai wajar.

Entitas diyaratkan untuk mempertimbangkan semua fakta dan keadaan apakah entitas merupakan entitas investasi, termasuk tujuan dan desainnya seperti:

a. memiliki lebih dari satu investasi;
b. memiliki lebih dari satu investor;
c. memiliki investor yang bukan merupakan pihak-pihak berelasi dari entitas;
d. memiliki bagian kepemilikan dalam bentuk kepentingan ekuitas atau kepentingan serupa.

Jika tidak terdapat karakteristik khusus tersebut tidak berarti mendiskualifikasikan entitas dari pengklasifikasian sebagai entitas investasi. Entitas investasi yang tidak memiliki seluruh karakterisktik khusus tersebut memberikan pengungkapan tambahan yang disyaratkan oleh PSAK 67 "Pengungkapan Kepentingan dalam Entitas Lain".

Entitas investasi disyaratkan untuk mengukur investasi dalam entitas anak pada nilai wajar melalui laba rugi.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

c. Prinsip-prinsip Konsolidasian (lanjutan)

Entitas Investasi – Pengecualian Konsolidasi (lanjutan)

Karena entitas investasi tidak disyaratkan untuk mengonsolidasi entitas anaknya, transaksi pihak berelasi intra kelompok usaha dan saldo tidak dieliminasi.

Sebagaimana diatur dalam PSAK 4 (Revisi 2013) "Laporan Keuangan Tersendiri", laporan keuangan tersendiri (entitas induk) dapat disajikan hanya jika laporan tersebut merupakan informasi tambahan pada laporan keuangan konsolidasian dan disajikan sebagai lampiran dalam laporan keuangan konsolidasian. Metode yang digunakan untuk mencatat investasi di entitas anak, asosiasi dan ventura bersama adalah metode biaya perolehan atau sesuai dengan PSAK 55 (Revisi 2014) "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran". Laporan keuangan tersendiri terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas.

Pengecualian terhadap konsolidasi hanya diterapkan pada entitas investasi tesebut. Oleh karenanya entitas induk dari entitas investasi mengonsolidasi seluruh entitas yang dikendalikannya, termasuk entitas yang dikendalikan melalui entitas anak yang merupakan entitas investasi, kecuali entitas induk itu sendiri merupakan entitas investasi. Persyaratan pengungkapan untuk laporan keuangan konsolidasian diatur dalam PSAK 67 "Pengungkapan Kepentingan dalam Entitas Lain".

d. Kombinasi Bisnis

Kombinasi bisnis dicatat menggunakan metode akuisisi. Biaya suatu akuisisi diakui sebagai penjumlahan atas imbalan yang dialihkan, yang diukur pada nilai wajar pada tanggal akuisisi, dan jumlah atas kepentingan nonpengendali dientitas yang diakuisisi. Biaya akuisisi yang terjadi dibiayakan dan dicatat sebagai beban pada periode berjalan.

Selisih lebih antara penjumlahan imbalan yang dialihkan dan jumlah yang diakui untuk kepentingan nonpengendali dengan aset teridentifikasi dan liabilitas yang diambil-alih (aset neto) dicatat sebagai goodwill. Dalam kondisi sebaliknya, Perusahaan mengakui selisih kurang tersebut sebagai keuntungan dalam laba rugi pada tanggal akuisisi.

Dalam suatu kombinasi bisnis yang dilakukan secara bertahap, pihak pengakuisisi mengukur kembali kepentingan ekuitas yang dimiliki sebelumnya pada pihak yang diakuisisi pada nilai wajar tanggal akuisisi dan mengakui keuntungan atau kerugian yang dihasilkan dalam laba atau rugi.

Pada tanggal akuisisi, goodwill awalnya diukur pada harga perolehan yang merupakan selisih lebih nilai agregat dari imbalan yang dialihkan dan jumlah setiap Kepentingan Non Pengendali (NCI) atas selisih jumlah dari aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih. Jika imbalan tersebut kurang dari nilai wajar aset neto entitas anak yang diakuisisi, selisih tersebut diakui dalam laba rugi sebagai keuntungan dari pembelian dengan diskon setelah sebelumnya manajemen melakukan penilaian atas identifikasi dan nilai wajar dari aset yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih.

Setelah pengakuan awal, goodwill diukur sebesar biaya perolehan dikurangi dengan akumulasi penurunan nilai. Untuk tujuan penurunan nilai, goodwill yang diperoleh dari kombinasi bisnis, sejak tanggal akuisisi dialokasikan ke setiap unit penghasil kas yang diharapkan mendapatkan manfaat dari kombinasi bisnis tersebut terlepas apakah aset dan liabilitas lainnya dari entitas yang diakuisisi ditetapkan ke unit tersebut.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

d. Kombinasi Bisnis

Jika goodwill telah dialokasikan pada suatu Unit Penghasil Kas (UPK) dan operasi tertentu atas UPK tersebut dihentikan, maka goodwill yang diasosiasikan dengan operasi yang dihentikan tersebut termasuk dalam jumlah tercatat operasi tersebut ketika menentukan keuntungan atau kerugian dari pelepasan. Goodwill yang dilepaskan tersebut diukur berdasarkan nilai relatif operasi yang dihentikan dan porsi UPK yang ditahan.

Goodwill merupakan selisih lebih antara harga perolehan investasi entitas anak, entitas asosiasi atau bisnis dan nilai wajar bagian Entitas Induk atas aset neto entitas anak/entitas asosiasi atau bisnis yang dapat diidentifikasi pada tanggal akuisisi. Goodwill dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau ketika tidak ada lagi manfaat masa depan yang diharapakan dari penggunaan atau pelepasannya.

e. Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali

Berdasarkan PSAK No. 38, pengalihan bisnis antara entitas sepengendali tidak mengakibatkan perubahan substansi ekonomi kepemilikan atas bisnis yang dialihkan dan tidak dapat menimbulkan laba atau rugi bagi Grup secara keseluruhan ataupun bagi entitas individual dalam Grup tersebut. Karena pengalihan bisnis antara entitas sepengendali tidak mengakibatkan perubahan substansi ekonomi, bisnis yang dipertukarkan dicatat pada nilai buku sebagai kombinasi bisnis dengan menggunakan metode penyatuan kepemilikan.

Dalam menerapkan metode penyatuan kepemilikan, komponen laporan keuangan konsolidasian untuk periode terjadinya kombinasi bisnis dan periode lain yang disajikan untuk tujuan perbandingan, disajikan sedemikian rupa seolah-olah kombinasi bisnis telah terjadi sejak awal periode terjadi sepengendalian. Selisih antara nilai tercatat transaksi kombinasi bisnis dan jumlah imbalan yang dialihkan diakui dalam akun "Tambahan modal disetor".

f. Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi

Kelompok Usaha melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi sebagaimana didefinisikan dalam PSAK No. 7 (Revisi 2010), "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi" dan PSAK No. 7 (Penyesuaian 2015), "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi".

PSAK ini mensyaratkan pengungkapan hubungan, transaksi dan saldo pihak-pihak berelasi, termasuk komitmen dalam laporan keuangan konsolidasian dan laporan keuangan tersendiri entitas induk dan juga diterapkan terhadap laporan keuangan secara individual. PSAK ini juga memberikan pengecualian dari persyaratan umum pengungkapan pihak berelasi atas transaksi dengan pemerintah dan entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama, atau dipengaruhi secara signifikan oleh Pemerintah (entitas berelasi dengan Pemerintah).

Pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas yang menyiapkan laporan keuangannya (entitas pelapor).

a. Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
   i memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
   ii memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
   iii personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk entitas pelapor.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

f. Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi (lanjutan)

Pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas yang menyiapkan laporan keuangannya (entitas pelapor). (lanjutan)

b. Suatu entitas mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika entitas jika memenuhi salah satu hal berikut:
   - i entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain).
   - ii satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).
   - iii kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.
   - iv suatu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.
   - v entitas tersebut adalah suatu program imbalan paska kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas lain yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor.
   - vi entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasikan dalam huruf (a).
   - vii orang yang didentifikasikan dalam huruf (a.i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).

Transaksi ini dilakukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak, dimana persyaratan tersebut mungkin tidak sama dengan transaksi lain yang dilakukan dengan pihak-pihak yang tidak berelasi. Seluruh transaksi dan saldo yang signifikan dengan pihak-pihak berelasi, baik yang dilakukan dengan atau tidak dengan persyaratan dan kondisi sebagaimana yang dilakukan dengan pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan pihak-pihak berelasi, telah diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang relevan.

g. Transaksi dan Saldo dalam Mata Uang Asing

Kelompok Usaha menerapkan PSAK No. 10 (revisi 2011), "Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing". PSAK revisi mengatur bagaimana memasukkan transaksi dalam valuta asing dan kegiatan usaha luar negeri ke dalam laporan keuangan entitas dan bagaimana menjabarkan laporan keuangan konsolidasian ke dalam suatu mata uang penyajian. Setiap entitas mempertimbangkan indikator utama dan indikator lainnya dalam menentukan mata uang fungsional. PSAK revisi ini tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian.

Pembukuan Kelompok Usaha diselenggarakan dalam mata uang Rupiah. Transaksi dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam Rupiah dengan kurs yang berlaku pada tanggal transaksi. Pada akhir periode pelaporan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam Rupiah dengan menggunakan kurs tengah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia pada tanggal tersebut. Keuntungan dan kerugian dari selisih kurs mata uang asing dan penjabaran aset dalam mata uang asing dan liabilitas moneter dalam mata uang Rupiah diakui dalam laporan laba rugi komprehensif periode berjalan, kecuali untuk keuntungan pertukaran dan kerugian yang timbul dari penjabaran laporan keuangan operasi asing ke mata uang penyajian Perusahaan yang diakui langsung dalam pendapatan komprehensif lain.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

g. Transaksi dan Saldo dalam Mata Uang Asing (lanjutan)

Kurs tengah yang digunakan Kelompok Usaha pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing:

	2020	2019
1 Dolar Amerika Serikat (USD)	Rp14.105	Rp13.901

h. Instrumen Keuangan

Sejak 1 Januari 2020, Grup menerapkan PSAK No. 71 "Instrumen Keuangan" termasuk Amandemen PSAK No. 71 "Instrumen Keuangan: Fitur Percepatan Pembayaran dengan Kompensasi Negatif". Amandemen PSAK No. 71 mengatur bahwa aset keuangan dengan fitur pelunasan dipercepat yang dapat mengakibatkan kompensasi negatif memenuhi kualifikasi karena arus kas kontraktual hanya berasal dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok utangnya dan Grup juga menerapkan PSAK No. 60 (Revisi 2014) "Keuangan Instrumen: Pengungkapan". PSAK No. 71 menggantikan PSAK No. 55 (Revisi 2014) "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran".

PSAK No. 50 (Revisi 2014), "Instrumen Keuangan: Penyajian", menguraikan persyaratan akuntansi penyajian dari instrumen keuangan, terutama untuk klasifikasi instrumen tersebut dalam aset keuangan, liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas. Standar ini juga memberikan panduan pada klasifikasi terkait dengan suku bunga, dividen dan keuntungan/kerugian, dan ketika aset keuangan dan liabilitas keuangan dapat di saling hapus.

PSAK No. 60 (Revisi 2014) mensyaratkan pengungkapan kuantitatif dan kualitatif dalam laporan keuangan yang memungkinkan para pengguna untuk mengevaluasi signifikansi instrumen keuangan atas posisi dan kinerja keuangan, dan sifat dan tingkat risiko yang timbul dari instrumen keuangan yang mana entitas adalah terekspos selama periode dan pada akhir periode pelaporan dan bagaimana entitas mengelola risiko-risiko tersebut. Selain itu, standar ini menjelaskan persyaratan untuk pengungkapan risiko likuiditas.

Aset keuangan

Pengakuan dan Pengukuran Awal

Aset keuangan diakui pada posisi keuangan ketika entitas menjadi pihak dalam penyediaan instrumen secara kontraktual. Semua aset keuangan diakui dan tidak diakui berdasarkan tanggal perdagangan di mana pembelian atau penjualan aset keuangan dilakukan berdasarkan kontrak yang persyaratannya mengharuskan penyerahan aset dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh pasar yang bersangkutan.

Aset keuangan pada awalnya diukur pada nilai wajar, dalam hal investasi tidak diklasifikasikan sebagai nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL), nilai wajar ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan atau penerbitan aset keuangan.

Semua aset keuangan yang diakui selanjutnya diukur secara keseluruhan baik pada biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar, tergantung pada klasifikasi aset keuangan.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

h. Instrumen Keuangan (Lanjutan)

Aset keuangan (lanjutan)

Pengukuran Selanjutnya

Instrumen utang yang memenuhi persyaratan berikut selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi:

- aset keuangan dimiliki dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan untuk mengumpulkan arus kas kontraktual; dan
- persyaratan kontraktual dari aset keuangan menimbulkan arus kas pada tanggal tertentu yang hanya merupakan pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.

Semua aset keuangan lain yang tidak diklasifikasikan sebagai biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (FVOCI) selanjutnya diukur pada FVTPL.

Biaya Perolehan Diamortisasi dan Metode Suku Bunga Efektif

Biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan adalah jumlah di mana aset keuangan diukur pada pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah amortisasi kumulatif dengan menggunakan metode suku bunga efektif dari setiap perbedaan antara jumlah awal dan jumlah jatuh tempo, disesuaikan dengan penyisihan kerugian. Di sisi lain, jumlah tercatat bruto dari aset keuangan adalah biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan sebelum disesuaikan dengan penyisihan kerugian.

Pendapatan bunga diakui dengan menggunakan metode suku bunga efektif untuk instrumen utang yang diukur kemudian pada biaya perolehan diamortisasi dan pada FVOCI. Untuk instrumen keuangan selain yang dibeli atau yang berasal dari aset keuangan memburuk, pendapatan bunga dihitung dengan menggunakan suku bunga efektif terhadap jumlah tercatat bruto dari aset keuangan (basis bruto), kecuali untuk aset keuangan yang kemudian mengalami penurunan nilai kredit.

Untuk aset keuangan yang kemudian mengalami penurunan nilai kredit, pendapatan bunga diakui dengan menerapkan suku bunga efektif pada biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan tersebut. Jika, pada periode pelaporan berikutnya, risiko kredit atas instrumen keuangan yang mengalami penurunan nilai kredit meningkat sehingga aset keuangan tidak lagi mengalami penurunan nilai kredit, maka pendapatan bunga diakui dengan menerapkan suku bunga efektif terhadap nilai tercatat bruto aset keuangan.

Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari instrumen utang dan metode untuk mengalokasikan pendapatan bunga selama periode yang relevan.

Untuk instrumen keuangan selain yang dibeli atau yang berasal dari aset keuangan memburuk (yaitu aset yang mengalami penurunan nilai kredit pada pengakuan awal), suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi penerimaan kas masa depan (termasuk semua biaya dan poin yang dibayarkan atau diterima merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi dan premi atau diskon lainnya) tidak termasuk kerugian kredit yang diharapkan, selama perkiraan umur dari instrumen utang, atau, jika sesuai, periode yang lebih pendek, ke jumlah tercatat bruto dari instrumen utang pada pengenalan awal.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

h. Instrumen Keuangan (Lanjutan)

Aset keuangan (lanjutan)

Biaya Perolehan Diamortisasi dan Metode Suku Bunga Efektif (lanjutan)

Untuk aset keuangan yang dibeli atau yang berasal dari aset keuangan memburuk, entitas mengakui pendapatan bunga dengan menerapkan suku bunga efektif yang disesuaikan dengan kredit ke biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan tersebut sejak pengakuan awal. Penghitungan tidak kembali ke basis bruto meskipun risiko kredit dari aset keuangan kemudian membaik sehingga aset keuangan tidak lagi memburuk.

Pendapatan bunga diakui dalam laba rugi dan dimasukkan dalam item baris "Pendapatan Keuangan - Pendapatan Bunga".

Investasi dalam Instrumen Utang yang Diklasifikasikan sebagai FVOCI

Instrumen utang pada awalnya diukur pada nilai wajar ditambah biaya transaksi. Selanjutnya, perubahan nilai tercatat instrumen utang sebagai akibat dari keuntungan dan kerugian selisih kurs, keuntungan atau kerugian penurunan nilai, dan pendapatan bunga yang dihitung dengan menggunakan metode suku bunga efektif, diakui dalam laba rugi. Jumlah yang diakui dalam laba rugi sama dengan jumlah yang akan diakui dalam laba rugi jika aset keuangan tersebut diukur dengan biaya perolehan diamortisasi. Semua perubahan lain dalam nilai tercatat dari aset keuangan tersebut diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan diakumulasi dalam judul cadangan revaluasi investasi. Ketika aset keuangan ini dihentikan pengakuannya, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain akan direklasifikasi ke laba rugi.

Investasi dalam Instrumen Ekuitas yang Ditetapkan pada FVOCI

Aset keuangan disimpan untuk diperdagangkan jika:
- diakuisisi terutama untuk tujuan menjualnya dalam waktu dekat; atau
- pada pengakuan awal, ini merupakan bagian dari portofolio instrumen keuangan teridentifikasi yang dikelola bersama oleh Grup dan memiliki bukti pola pengambilan laba jangka pendek aktual terkini;
- merupakan derivatif (kecuali untuk derivatif yang merupakan kontrak jaminan keuangan atau instrumen lindung nilai yang ditetapkan dan efektif).

Investasi dalam instrumen ekuitas pada FVOCI pada awalnya diukur pada nilai wajar ditambah biaya transaksi. Selanjutnya, nilai wajar tersebut diukur pada nilai wajar dengan keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar diakui dalam penhasilan komprehensif lain dan diakumulasi dalam cadangan revaluasi investasi. Keuntungan atau kerugian kumulatif tidak akan direklasifikasi ke laba rugi atas pelepasan investasi ekuitas, melainkan akan ditransfer ke saldo laba ditahan.

Pendapatan dividen dari investasi dalam instrumen ekuitas ini diakui dalam laba rugi ketika hak Grup untuk menerima dividen ditetapkan, kecuali dividen tersebut secara jelas mewakili pemulihan sebagian biaya investasi. Dividen disertakan dalam baris rincian "Pendapatan Keuangan – Pendapatan Dividen" dalam laba rugi.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

h. Instrumen Keuangan (Lanjutan)

Aset keuangan (lanjutan)

Aset Keuangan pada FVTPL

Aset keuangan yang tidak memenuhi kriteria untuk diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau FVOCI diukur pada FVTPL.

Aset keuangan pada FVTPL diukur pada nilai wajar pada setiap tanggal pelaporan, dengan keuntungan atau kerugian nilai wajar diakui dalam laba rugi sepanjang bukan merupakan bagian dari hubungan lindung nilai yang ditentukan. Keuntungan atau kerugian bersih yang diakui dalam laba rugi termasuk dividen atau bunga yang diperoleh dari aset keuangan dan dimasukkan dalam item baris "Keuntungan dan Kerugian Lainnya".

Penurunan Nilai Aset Keuangan

Grup selalu mengakui ECL sepanjang umur untuk piutang usaha. Kerugian kredit ekspektasian atas aset keuangan ini diestimasi dengan menggunakan matriks provisi berdasarkan pengalaman kerugian kredit historis Grup, disesuaikan untuk faktor-faktor yang spesifik bagi debitur, kondisi ekonomi secara umum dan penilaian terhadap arah saat ini maupun arah kondisi perkiraan kerugian pada tanggal pelaporan, termasuk nilai waktu uang jika sesuai.

Untuk semua instrumen keuangan lainnya, Grup mengakui ECL sepanjang umur ketika terdapat peningkatan yang signifikan dalam risiko kredit sejak pengakuan awal. Sebaliknya, jika risiko kredit atas instrumen keuangan tidak meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, Grup mengukur penyisihan kerugian untuk instrumen keuangan tersebut dengan jumlah yang sama dengan ECL 12 bulan (12mECL). Penilaian apakah ECL sepanjang umur harus diakui didasarkan pada peningkatan signifikan dalam kemungkinan atau risiko gagal bayar yang terjadi sejak pengakuan awal alih-alih pada bukti aset keuangan mengalami penurunan nilai kredit pada tanggal pelaporan atau terjadi gagal bayar (default) yang sebenarnya.

ECL sepanjang umur merupakan kerugian kredit ekspektasian yang dihasilkan dari semua kemungkinan peristiwa gagal bayar (default) selama perkiraan umur instrumen keuangan. Sebaliknya, 12mECL merupakan porsi ECL sepanjang umur yang diharapkan dihasilkan dari peristiwa gagal bayar (default) pada instrumen keuangan yang mungkin terjadi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Risiko Kredit Meningkat Signifikan

Dalam menilai apakah risiko kredit pada instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, Grup membandingkan risiko gagal bayar (default) yang terjadi pada instrumen keuangan pada tanggal pelaporan dengan risiko gagal bayar (default) yang terjadi pada instrumen keuangan pada tanggal pengakuan awal. Dalam melakukan penilaian ini, Grup mempertimbangkan informasi kuantitatif dan kualitatif yang wajar dan dapat didukung, termasuk pengalaman historis dan informasi berwawasan ke depan yang tersedia tanpa biaya atau upaya yang tidak semestinya. Informasi berwawasan ke depan yang dipertimbangkan mencakup prospek masa depan industri tempat debitur entitas beroperasi, yang diperoleh dari laporan ahli ekonomi, analis keuangan, badan pemerintah, lembaga pemikir (think-tanks) terkait, dan organisasi serupa lainnya, serta pertimbangan berbagai sumber eksternal dan memperkirakan informasi ekonomi yang terkait dengan operasi inti Grup.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

h. Instrumen Keuangan (Lanjutan)

Aset keuangan (lanjutan)

Risiko Kredit Meningkat Signifikan (lanjutan)

Grup secara berkala memantau efektivitas kriteria yang digunakan untuk mengidentifikasi apakah terdapat peningkatan risiko kredit yang signifikan dan merevisinya sesuai kebutuhan untuk memastikan bahwa kriteria tersebut mampu mengidentifikasi peningkatan risiko kredit yang signifikan sebelum jumlah tersebut jatuh tempo.

Grup mengakui keuntungan atau kerugian penurunan nilai dalam laba rugi untuk semua instrumen keuangan dengan penyesuaian yang sesuai dengan nilai tercatatnya melalui akun penyisihan kerugian, kecuali untuk investasi dalam instrumen hutang yang diukur pada FVOCI, di mana penyisihan kerugian diakui pada penghasilan komprehensif lain dan diakumulasi dalam cadangan revaluasi investasi, dan tidak mengurangi nilai tercatat aset keuangan pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

Kebijakan Penghapusan

Grup menghapus aset keuangan jika terdapat informasi yang menunjukkan bahwa debitur berada dalam kesulitan keuangan yang parah dan tidak ada prospek pemulihan yang realistis. Aset keuangan yang dihapuskan mungkin masih tunduk pada aktivitas penegakan hukum berdasarkan prosedur pemulihan Grup, dengan mempertimbangkan nasehat hukum jika sesuai. Setiap pemulihan yang dilakukan diakui dalam laba rugi.

Penghentian Pengakuan Aset Keuangan

Grup menghentikan pengakuan aset keuangan hanya jika hak kontraktual atas arus kas dari aset tersebut berakhir, atau saat aset keuangan tersebut dialihkan dan secara substansial seluruh risiko dan manfaat kepemilikan aset kepada pihak lain. Jika Grup tidak mengalihkan atau mempertahankan secara substansial seluruh risiko dan manfaat kepemilikan dan terus mengendalikan aset yang dialihkan, Grup mengakui hak kepemilikannya atas aset dan liabilitas terkait sebesar jumlah yang mungkin harus dibayar. Jika Grup memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat kepemilikan aset keuangan yang dialihkan, Grup tetap mengakui aset keuangan dan juga mengakui pinjaman yang dijamin sebesar hasil yang diterima.

Pada penghentian pengakuan aset keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi, perbedaan antara nilai tercatat aset dan jumlah imbalan yang diterima dan piutang diakui dalam laba rugi. Selain itu, pada penghentian pengakuan investasi dalam instrumen utang yang diklasifikasikan sebagai FVOCI, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakumulasi dalam cadangan revaluasi investasi direklasifikasi ke laba rugi.

Sebaliknya, pada penghentian pengakuan investasi dalam instrumen ekuitas yang telah ditetapkan Entitas pada pengakuan awal untuk diukur pada FVOCI, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakumulasi dalam cadangan revaluasi investasi tidak direklasifikasi ke laba rugi, tetapi dipindahkan ke saldo laba ditahan.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

h. Instrumen Keuangan (Lanjutan)

Liabilitas Keuangan

Semua liabilitas keuangan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif atau pada FVTPL.

Liabilitas Keuangan Selanjutnya Diukur pada FVTPL

Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai FVTPL jika liabilitas keuangan merupakan imbalan kontinjensi dari pihak pengakuisisi dalam kombinasi bisnis, dimiliki untuk diperdagangkan atau ditetapkan sebagai FVTPL.

Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk diperdagangkan jika:
- telah diperoleh terutama untuk tujuan dibeli kembali dalam waktu dekat; atau
- pada pengakuan awal, ini merupakan bagian dari portofolio instrumen keuangan yang diidentifikasi yang dikelola bersama oleh entitas dan memiliki pola pengambilan keuntungan jangka pendek aktual terkini; atau
- merupakan derivatif, kecuali untuk derivatif yang merupakan kontrak jaminan keuangan atau instrumen lindung nilai yang ditetapkan dan efektif.

Liabilitas keuangan pada FVTPL disajikan sebesar nilai wajar dengan keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar yang diakui dalam laba rugi sepanjang hal tersebut bukan merupakan bagian dari hubungan lindung nilai yang ditentukan. Keuntungan atau kerugian bersih yang diakui dalam laba rugi menggabungkan setiap bunga yang dibayarkan atas liabilitas keuangan dan dimasukkan dalam item baris "Keuntungan dan Kerugian Lain-lain".

Namun, untuk liabilitas keuangan yang ditetapkan sebagai FVTPL, jumlah perubahan nilai wajar liabilitas keuangan yang dapat diatribusikan pada perubahan risiko kredit sendiri dari liabilitas tersebut diakui dalam penghasilan komprehensif lain, kecuali pengakuan dampak dari perubahan risiko kredit liabilitas dalam penghasilan komprehensif lain akan menciptakan atau memperbesar inkonsistensi akuntansi dalam laba rugi. Sisa perubahan nilai wajar karena selain risiko kredit sendiri dari liabilitas diakui dalam laba rugi. Perubahan nilai wajar yang dapat diatribusikan pada risiko kredit liabilitas keuangan diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan kemudian tidak direklasifikasi ke laba rugi; sebagai gantinya, dapat dipindahkan ke saldo laba pada saat penghentian pengakuan liabilitas keuangan.

Liabilitas Keuangan Selanjutnya Diukur pada Biaya Perolehan Diamortisasi

Liabilitas keuangan yang bukan merupakan imbalan kontinjensi dari pihak pengakuisisi dalam kombinasi bisnis, tidak dimiliki untuk diperdagangkan, atau ditetapkan sebagai FVTPL, selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Metode suku bunga efektif adalah metode untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari liabilitas keuangan dan metode untuk mengalokasikan beban bunga selama periode yang relevan. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran tunai di masa depan (termasuk semua biaya dan poin yang dibayarkan atau diterima yang merupakan bagian integral dari suku bunga efektif, biaya transaksi, dan premi atau diskon lainnya) selama perkiraan umur liabilitas keuangan, atau (jika sesuai) periode yang lebih singkat, untuk biaya perolehan diamortisasi dari liabilitas keuangan.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

h. Instrumen Keuangan (Lanjutan)

Liabilitas Keuangan (lanjutan)

Penghentian Pengakuan Liabilitas Keuangan

Grup menghentikan pengakuan liabilitas keuangannya jika, dan hanya jika, kewajiban Grup dilepaskan, dibatalkan, atau habis masa berlakunya. Selisih antara nilai tercatat liabilitas keuangan yang dihentikan pengakuannya dan imbalan yang dibayarkan dan terutang, termasuk aset non tunai yang dialihkan atau liabilitas yang diambil alih, diakui dalam laba rugi.

Ketika Grup menukar dengan pemberi pinjaman yang eksis, suatu instrumen utang ke instrumen lain dengan persyaratan yang secara substansial berbeda, pertukaran tersebut dicatat sebagai penghapusan liabilitas keuangan awal dan pengakuan liabilitas keuangan baru. Demikian pula, Grup mencatat modifikasi substansial dari persyaratan liabilitas yang ada atau bagian darinya sebagai penghapusan liabilitas keuangan asli dan pengakuan liabilitas baru.

Diasumsikan bahwa persyaratannya secara substansial berbeda jika nilai sekarang yang didiskontokan dari arus kas menurut persyaratan baru, termasuk biaya yang dibayarkan setelah dikurangi biaya yang diterima dan didiskontokan menggunakan tarif efektif awal sekurang-kurangnya 10 persen berbeda dari nilai wajar yang didiskontokan atas nilai sisa arus kas dari liabilitas keuangan awal. Jika modifikasi tidak substansial, perbedaan antara: (1) nilai tercatat liabilitas sebelum modifikasi; dan (2) nilai kini arus kas setelah modifikasi harus diakui dalam laba rugi sebagai keuntungan atau kerugian modifikasi dalam keuntungan dan kerugian lain.

Pengaturan Saling Hapus

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan jumlah bersih disajikan di laporan posisi keuangan konsolidasian jika, dan hanya jika, Grup memiliki hak yang dapat diberlakukan secara hukum untuk menghapus jumlah yang diakui; dan bermaksud untuk menyelesaikan secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan. Hak untuk kompensasi harus tersedia saat kini daripada bergantung pada peristiwa di masa depan dan harus dapat dilaksanakan oleh salah satu pihak lawan, baik dalam kegiatan bisnis normal dan dalam hal terjadi gagal bayar (default), keadaan tidak dapat membayar (insolvency) atau kebangkrutan.

Dampak atas Transisi PSAK No. 71

Grup telah mengevaluasi klasifikasi dan pengukuran instrumen keuangan berdasarkan karakteristik dari arus kas kontraktual dan model bisnis, serta metode kerugian ekspetasian untuk mengakui penyisihan kerugian untuk kerugian kredit ekspektasian yang menghasilkan informasi yang lebih tepat waktu.

Grup berkeyakinan bahwa tidak terdapat dampak signifikan dari penerapan PSAK No. 71 dan tidak memerlukan penyesuaian di saldo awal 1 Januari 2020 disebabkan instrumen keuangan Grup pada umumnya berjangka waktu kurang dari satu tahun.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

i. Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas terdiri dari kas, kas di bank dan deposito berjangka dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan atau kurang sejak tanggal penempatan dan tidak dijadikan sebagai jaminan pinjaman serta tanpa pembatasan penggunaan.

j. Piutang Usaha

Piutang usaha dinyatakan sebesar jumlah nominal setelah dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai. Penurunan nilai piutang ditetapkan berdasarkan penelaahan terhadap kemungkinan tidak tertagihnya piutang tersebut pada akhir periode yang bersangkutan.

k. Persediaan

Persediaan dinyatakan sebesar nilai yang lebih rendah antara biaya perolehan atau nilai realisasi neto. Biaya perolehan persediaan Grup ditentukan dengan menggunakan metode first-in, first-out (FIFO). Nilai realisasi neto ditentukan berdasarkan taksiran harga jual dalam kegiatan usaha normal setelah dikurangi dengan taksiran beban yang diperlukan untuk menyelesaikan dan menjual persediaan tersebut.

Penyisihan untuk penurunan nilai persediaan dan persediaan usang ditentukan berdasarkan penelaahan atas kondisi persediaan pada akhir tahun untuk menyesuaikan nilai persediaan ke nilai realisasi neto.

l. Aset Tetap

Grup menerapkan PSAK 16 (Revisi 2011) "Aset Tetap", termasuk PSAK 16 (Penyesuaian 2015) "Aset Tetap" dan Amandemen 2015 PSAK 16 "Aset Tetap tentang Klarifikasi Metode yang Diterima untuk Penyusutan dan Amortisasi".

PSAK No. 16 (Penyesuaian 2015) ini memberikan klarifikasi paragraf 35 terkait model revaluasi, bahwa ketika Grup menggunakan model revaluasi, jumlah tercatat aset disajikan kembali pada jumlah revaluasiannya.

Amandemen 2015 PSAK No. 16 memberikan tambahan penjelasan tentang indikasi perkiraan keusangan teknis atau komersial suatu aset dan juga memberikan klarifikasi bahwa penggunaan metode penyusutan yang berdasarkan pada pendapatan adalah tidak tepat.

Grup telah memilih model biaya (*cost model*) sebagai kebijakan akuntansi pengukuran aset tetapnya.

Aset tetap dinyatakan sebesar biaya perolehan, kecuali tanah, dikurangi akumulasi penyusutan dan rugi penurunan nilai. Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus (*straight line method*) selama umur manfaat aset. Taksiran masa manfaat ekonomis sebagai berikut:

	Persentase (%)	Masa manfaat (Tahun)
Bangunan	5%	20
Convention hall	5%	20
Prasarana	12,5%	8
Mesin dan peralatan	12,5%	8
Kendaraan	12,5% - 25%	4 - 8
Peralatan dan perabotan	25%	4

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

l. Aset Tetap (Lanjutan)

Biaya pengurusan legal hak atas tanah dalam bentuk Hak Guna Bangunan ("HGB") ketika tanah diperoleh pertama kali diakui sebagai bagian dari biaya perolehan tanah pada akun "Aset Tetap" dan tidak diamortisasi. Sementara biaya pengurusan atas perpanjangan HGB diakui sebagai bagian dari akun "Beban Ditangguhkan, Neto" pada laporan posisi keuangan dan diamortisasi sepanjang mana yang lebih pendek antara umur hukum hak dan umur ekonomis tanah.

Pada setiap akhir tahun buku, manajemen mengkaji ulang nilai residu, umur manfaat dan metode penyusutan, dan jika sesuai dengan keadaan, disesuaikan secara prospektif.

Beban perbaikan dan pemeliharaan dibebankan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif konsolidasian lain pada saat terjadinya; Biaya penggantian atau inspeksi yang signifikan dikapitalisasi pada saat terjadinya, dan jika besar kemungkinan manfaat ekonomis dimasa depan berkenaan dengan aset tersebut akan mengalir ke Grup, dan biaya perolehan aset dapat diukur secara andal.

Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau ketika tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset (dihitung sebagai perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan dan jumlah tercatat dari aset) dimasukkan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain pada tahun aset tersebut dihentikan pengakuannya.

Aset dalam penyelesaian disajikan dalam "Aset Tetap" dan dinyatakan sebesar biaya perolehan. Akumulasi biaya perolehan untuk aset dalam penyelesaian akan dipindahkan ke masing-masing aset tetap yang bersangkutan pada saat aset tersebut selesai dikerjakan dan siap digunakan sesuai dengan tujuannya.

m. Aset Tetap Dalam Pengembangan

Aset tetap dalam pembangunan dinyatakan sebesar biaya perolehan dan disajikan sebagai bagian dari aset tetap. Akumulasi biaya perolehan akan dipindahkan ke akun aset tetap yang bersangkutan pada saat aset tersebut telah selesai dikerjakan dan siap untuk digunakan sesuai dengan tujuan penggunaannya. Penyusutan mulai dibebankan sejak tanggal aset tersebut siap untuk digunakan untuk tujuan penggunaannya.

n. Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan

Pada setiap akhir periode pelaporan, Grup menilai apakah terdapat indikasi suatu aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut atau pada saat pengujian secara tahunan penurunan nilai aset diperlukan, maka Grup membuat estimasi jumlah terpulihkan aset tersebut.

Jumlah terpulihkan suatu aset atau Cash General Unit (CGU) adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar dikurangi biaya pelepasan dan nilai pakainya. Jika jumlah terpulihkan suatu aset lebih kecil dari nilai tercatatnya, nilai tercatat harus diturunkan menjadi sebesar terpulihkan. Kerugian penurunan nilai diakui segera dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, kecuali berkaitan dengan aset revaluasian dimana rugi penurunan nilai diperlakukan sebagai penurunan revaluasi di OCI.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

n. Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan (lanjutan)

Kerugian penurunan nilai yang telah diakui dalam periode sebelumnya untuk aset selain goodwill dibalik jika, dan hanya jika, terdapat perubahan asumsi-asumsi yang digunakan untuk menentukan jumlah terpulihkan aset tersebut sejak rugi penurunan nilai terakhir diakui. Dalam hal ini, jumlah tercatat aset dinaikkan ke jumlah terpulihkannya. Pembalikan tersebut dibatasi sehingga jumlah tercatat aset tidak melebihi jumlah tercatat, neto setelah penyusutan, seandainya tidak ada rugi penurunan nilai yang telah diakui untuk aset tersebut pada tahun sebelumnya. Pembalikan rugi penurunan nilai diakui sebagai keuntungan dalam laporan laba rugi kecuali terkait dengan aset revaluasian dimana pembalikan diperlakukan sebagai kenaikan revaluasi dalam OCI.

o. Utang usaha

Utang usaha adalah kewajiban untuk membayar barang atau jasa yang telah diperoleh dari pemasok dalam kegiatan usaha normal. Utang usaha dikelompokkan sebagai liabilitas jangka pendek apabila pembayaran jatuh tempo dalam waktu satu tahun atau kurang. Jika tidak, utang usaha tersebut disajikan sebagai liabilitas jangka panjang.

p. Pinjaman

Pada saat pengakuan awal, pinjaman diakui sebesar nilai wajar, dikurangi dengan biaya-biaya transaksi yang terjadi. Selanjutnya, pinjaman diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi. Selisih antara penerimaan (dikurangi biaya transaksi) dan nilai pelunasan dicatat pada laporan laba rugi selama periode pinjaman dengan menggunakan metode bunga efektif.

Bunga dan beban keuangan lainnya yang timbul dari pinjaman yang diperoleh untuk mendanai perolehan dan pengembangan tanah dan serta pembangunan bangunan dikapitalisasi ke persediaan dan tanah untuk pengembangan, yang mana lebih sesuai. Biaya pinjaman yang dikapitalisasi terdiri dari beban bunga, beban bank dan selisih kurs yang terjadi sehubungan dengan perolehan pinjaman tersebut.

Besarnya biaya pinjaman yang dikapitalisasi dalam suatu periode ditentukan berdasarkan tingkat kapitalisasi dikalikan dengan jumlah yang dikeluarkan untuk perolehan, pematangan dan pembangunan tahun berjalan.

q. Pengakuan Pendapatan dan Beban

<u>Pendapatan</u>

Dalam menentukan pengakuan pendapatan, Perusahaan melakukan analisa transaksi melalui lima langkah analisa berikut:

1. Mengindentifikasi kontrak dengan pelanggan, dengan kriteria sebagai berikut:
   - Kontrak telah disetujui oleh pihak- pihak terkait dalam kontrak;
   - Perusahaan bisa mengidentifikasi hak dari pihak-pihak terkait dan jangka waktu pembayaran dari barang atau jasa yang akan dialihkan;

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

q. Pengakuan Pendapatan dan Beban (Lanjutan)

Pendapatan (Lanjutan)

Dalam menentukan pengakuan pendapatan, Perusahaan melakukan analisa transaksi melalui lima langkah analisa berikut: (Lanjutan)

1. Mengindentifikasi kontrak dengan pelanggan, dengan kriteria sebagai berikut: (Lanjutan)
   - Kontrak memiliki substansi komersial; dan
   - Besar kemungkinan Perusahaan akan menerima imbalan atas barang atau jasa yang dialihkan.
2. Mengidentifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak, untuk menyerahkan barang atau jasa yang memiliki karakteristik yang berbeda ke pelanggan.
3. Menentukan harga transaksi, setelah dikurangi diskon, retur, insentif penjualan, pajak penjualan barang mewah, pajak pertambahan nilai dan pungutan ekspor, yang berhak diperoleh suatu entitas sebagai kompensasi atas diserahkannya barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan.
4. Mengalokasikan harga transaksi kepada setiap kewajiban pelaksanaan dengan menggunakan dasar harga jual dari setiap barang atau jasa yang dijanjikan di kontrak.
5. Mengakui pendapatan ketika kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi (sepanjang waktu atau pada suatu waktu tertentu).

Pembayaran harga transaksi berbeda untuk setiap kontrak. Aset kontrak diakui apabila kewajiban pelaksanaan yang telah dipenuhi melebihi pembayaran yang dilakukan oleh pelanggan. Liabilitas kontrak diakui ketika pembayaran yang dilakukan oleh pelanggan melebihi kewajiban pelaksanaan yang telah dipenuhi. Aset kontrak disajikan dalam "Piutang usaha" dan liabilitas kontrak disajikan dalam "Utang usaha" dan "Liabilitas lain-lain".

Kriteria tertentu juga harus terpenuhi untuk setiap aktivitas Perusahaan seperti yang dijelaskan di bawah.

Pendapatan dari penjualan barang diakui pada saat pengalihan risiko dan manfaat kepemilikan barang secara signifikan kepada pelanggan, yang pada umumnya bertepatan dengan pengiriman dan penerimaan barang yang dijual. Pendapatan tidak diakui sejauh ada ketidakpastian yang signifikan mengenai pemulihan jumlah imbalan, biaya terkait, atau kemungkinan pengembalian barang.

Pendapatan jasa diakui pada saat pelanggan menerima dan mengonsumsi manfaat dari jasa tersebut.

Beban

Beban diakui pada saat terjadinya.

r. Pajak Penghasilan

Grup menerapkan PSAK No. 46 (Revisi 2014), "Pajak Penghasilan". Selain itu, Grup juga menerapkan ISAK No. 20, "Pajak Penghasilan: Perubahan Dalam Status Pajak Perusahaan atau Para Pemegang Saham".

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

r. Pajak Penghasilan (Lanjutan)

PSAK 46 (Penyesuaian 2018) menegaskan konsekuensi pajak penghasilan atas dividen dengan menghapus paragraf 52B dan menambahkan paragraf 57A. Konsekuensi pajak penghasilan atas dividen (sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 71: Instrumen Keuangan) timbul ketika Grup mengakui liabilitas untuk membayar dividen. Konsekuensi pajak penghasilan berhubungan lebih langsung dengan transaksi atau peristiwa masa lalu yang menghasilkan keuntungan yang dapat didistribusikan daripada distribusi kepada pemilik. Oleh karena itu, Grup mengakui konsekuensi pajak penghasilan dalam laporan laba rugi, penghasilan komprehensif lain atau ekuitas sesuai dengan pengakuan awal Grup atas transaksi atau peristiwa masa lalu tersebut.

Beban pajak tahun berjalan ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 29/1996 tanggal 18 April 1996, diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 34/2017 tanggal 6 September 2017 mengenai persewaan tanah dan atau bangunan yang melingkupi kegiatan usaha utama Perusahaan dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final (”PPh Final“) sebesar 10%. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 30 Tahun 2020 tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka. Aturan ini merupakan aturan turunan dari Undang-Undang (UU) No. 2 Tahun 2020 ini dan berlaku sejak tanggal diundangkan, yaitu pada 19 Juni 2020. Penghasilan dan beban lain yang tidak terkait dengan kegiatan usaha utama tersebut dan belum dikenakan PPh Final lainnya dikenakan pajak penghasilan badan (”PPh Pasal 29“) dengan tarif sebesar 22% pada 31 Desember 2020 dan 25% pada 31 Desember 2019.

s. Liabilitas Imbalan Kerja Karyawan

Grup menerapkan PSAK No. 24 (Revisi 2014), “Imbalan Kerja” dan Amandemen 2015 PSAK No. 24, “Imbalan Kerja tentang Program Imbalan Pasti: Iuran Pekerja”, termasuk Penyesuaian 2016 PSAK No. 24. Selain itu, Grup juga mengadopsi ISAK No. 15, "PSAK No. 24: Batas Aset Imbalan Pasti, Persyaratan Pendanaan Minimum dan Interaksinya" dan amandemen tahunan 2018 PSAK 24: “Imbalan Kerja tentang Kurtailmen, atau Program Penyelesaian dan Penyesuaian”.

PSAK revisi ini, memperkenalkan persyaratan untuk sepenuhnya mengakui perubahan dalam kewajiban (aset) imbalan pasti termasuk pengakuan segera dari biaya imbalan pasti termasuk biaya jasa lalu yang belum menjadi hak (vested), dan memerlukan pemilahan dari biaya imbalan pasti keseluruhan menjadi komponen-komponen dan membutuhkan pengakuan pengukuran kembali OCI (menghilangkan pendekatan “koridor”), meningkatkan pengungkapan tentang program imbalan pasti, modifikasi akuntansi untuk pesangon, termasuk membedakan antara imbalan yang diberikan dalam pemberian jasa dan imbalan yang diberikan dalam pemutusan hubungan kerja, dan mengubah pengakuan dan pengukuran imbalan pesangon.

Amandemen 2015 PSAK No. 24 menyederhanakan akuntansi untuk kontribusi iuran dari pekerja atau pihak ketiga yang tidak bergantung pada jumlah tahun jasa, misalnya iuran pekerja yang dihitung berdasarkan persentase tetap dari gaji.

Amandemen 2018 PSAK 24 memberikan panduan yang lebih jelas bagi Grup dalam mengakui biaya jasa lalu, penyelesaian keuntungan dan kerugian, biaya jasa kini dan bunga bersih setelah amandemen, kurtailmen, atau program penyelesaian karena semuanya tersebut menggunakan asumsi aktuaria terbaru (sebelumnya digunakan asumsi aktuaria pada awal periode pelaporan tahunan).

Grup mengadopsi program imbalan pasti yang tidak didanai dan mencatat imbalan kerja untuk memenuhi imbalan di bawah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

Pengakuan

Beban imbalan kerja untuk pekerja harus diakui pada periode dimana imbalan diperoleh oleh pekerja, daripada ketika dibayar atau terutang.

Komponen biaya imbalan pasti diakui sebagai berikut:
1. biaya jasa diatribusikan ke periode sekarang dan masa lalu diakui dalam laporan laba rugi;
2. bunga neto pada liabilitas atau aset imbalan pasti ditentukan dengan menggunakan tingkat diskonto pada awal periode diakui dalam laporan laba rugi;
3. pengukuran kembali dari liabilitas atau aset imbalan pasti terdiri dari:
   - keuntungan dan kerugian aktuarial;
   - timbal balik aset program;
   - setiap perubahan dalam dampak batas atas aset, tidak termasuk jumlah yang dimasukkan dalam bunga neto atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto.

diakui di OCI (tidak direklasifikasi ke laba rugi pada periode berikutnya).

Pengukuran

Pengukuran liabilitas (aset) imbalan pasti bersih mensyaratkan penerapan metode penilaian aktuaria, atribusi imbalan untuk periode jasa, dan penggunaan asumsi aktuaria. Nilai wajar aset program dikurangi dari nilai kini liabilitas imbalan pasti dalam menentukan defisit bersih atau surplus.

Nilai kini liabilitas imbalan pasti Grup dan biaya jasa terkait ditentukan dengan menggunakan metode "Projected Unit Credit", yang menganggap setiap periode jasa akan menghasilkan satu unit tambahan dari imbalan dan mengukur setiap unit secara terpisah untuk menghasilkan liabilitas akhir.

Hal ini mensyaratkan Grup untuk mengatribusikan imbalan pada periode kini (untuk menentukan biaya jasa kini) dan periode kini dan periode lalu (untuk menentukan nilai kini liabilitas imbalan pasti). Imbalan tersebut diatribusikan sepanjang periode jasa menggunakan formula imbalan yang dimiliki program, kecuali jasa pekerja di tahun tahun akhir akan meningkat secara material dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, dalam hal ini menggunakan dasar metode garis lurus.

Biaya jasa lalu adalah perubahan liabilitas imbalan pasti atas jasa pekerja pada periode-periode lalu, yang timbul sebagai akibat dari perubahan pengaturan program dalam periode kini (yaitu memperkenalkan perubahan program atau mengubah imbalan yang akan dibayar, atau kurtailmen yang secara signifikan mengurangi jumlah pekerja yang disertakan).

s. Liabilitas Imbalan Kerja Karyawan (lanjutan)

Biaya jasa lalu diakui sebagai beban pada awal tanggal ketika perubahan program atau kurtailmen terjadi dan tanggal ketika Grup mengakui setiap pesangon, atau biaya terkait restrukturisasi dalam PSAK No. 57, "Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi".

Keuntungan atau kerugian atas penyelesaian program imbalan pasti diakui pada saat penyelesaian terjadi.

Sebelum biaya jasa lalu ditentukan, atau keuntungan atau kerugian pada penyelesaian diakui, liabilitas imbalan pasti atau aset disyaratkan untuk diukur kembali, namun Grup tidak disyaratkan untuk membedakan antara biaya jasa lalu yang dihasilkan dari kurtailmen dan keuntungan dan kerugian pada penyelesaian di mana transaksi ini terjadi bersama-sama.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

t. Segmen Operasi

Segmen adalah bagian khusus dari Perusahaan atau Entitas Anak yang terlibat baik dalam menyediakan produk dan jasa (segmen usaha), maupun dalam menyediakan produk dan jasa dalam lingkungan ekonomi tertentu (segmen geografis), yang memiliki risiko dan imbalan yang berbeda dari segmen lainnya. Pendapatan, beban, hasil, aset dan liabilitas segmen termasuk item-item yang dapat diatribusikan langsung kepada suatu segmen serta hal-hal yang dapat dialokasikan dengan dasar yang sesuai kepada segmen tersebut. Segmen ditentukan sebelum saldo dan transaksi antar grup, dieliminasi sebagai bagian dari proses konsolidasi.

Grup menerapkan PSAK No. 5 (Revisi 2009): Segmen Operasi. Standar mengharuskan entitas untuk mengungkapkan informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi sifat dan dampak keuangan dari aktivitas bisnis.

u. Laba Per Saham

Kelompok Usaha menerapkan PSAK 56 (Revisi 2011) "Laba per Saham". PSAK 56 (Revisi 2011) ini menetapkan prinsip penentuan dan penyajian laba per saham, sehingga meningkatkan daya banding kinerja antar entitas berbeda pada periode pelaporan sama dan antar periode pelaporan berbeda untuk entitas yang sama.

Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba tahun berjalan dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar dalam tahun yang bersangkutan.

v. Biaya Emisi Saham

Seluruh beban yang terjadi sehubungan dengan penawaran saham Entitas Induk kepada masyarakat dicatat sebagai pengurang akun "Tambahan Modal Disetor" yang merupakan komponen ekuitas di dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

w. Peristiwa Setelah Periode Pelaporan

Peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan yang menyediakan tambahan informasi mengenai posisi keuangan Grup pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian (peristiwa penyesuaian), jika ada, telah tercermin dalam laporan keuangan konsolidasian.

Peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan yang tidak memerlukan penyesuaian (peristiwa non-penyesuaian), apabila jumlahnya material, telah diungkapkan dalam laporan keuangan konsolidasian .

4. PENGGUNAAN ESTIMASI, PERTIMBANGAN DAN ASUMSI MANAJEMEN

Pertimbangan, Estimasi dan Asumsi

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian mengharuskan manajemen Grup untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan dari pendapatan, beban, aset dan liabilitas, dan pengungkapan atas liabilitas kontijensi, pada akhir periode pelaporan. Ketidakpastian mengenai pertimbangan, estimasi dan asumsi tersebut dapat mengakibatkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat pada aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya.

Asumsi utama masa depan dan sumber utama estimasi ketidakpastian lain pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk periode berikutnya diungkapkan dibawah ini.

4. PENGGUNAAN ESTIMASI, PERTIMBANGAN DAN ASUMSI MANAJEMEN (Lanjutan)

Pertimbangan, Estimasi dan Asumsi (Lanjutan)

Grup mendasarkan estimasi dan asumsi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan konsolidasian disusun. Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi diluar kendali Grup. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

Pertimbangan, estimasi dan asumsi berikut ini dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Grup yang memiliki pengaruh paling signifikan atas jumlah yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian:

Menentukan Metode Penyusutan dan Estimasi Masa Manfaat Aset Tetap

Grup mengestimasi masa manfaat ekonomis aset tetap berdasarkan utilisasi dari aset yang diharapkan dan didukung dengan rencana dan strategi usaha dan perilaku pasar. Estimasi dari masa manfaat aset tetap adalah berdasarkan penelaahan Grup terhadap praktek industri, evaluasi teknis internal dan pengalaman untuk aset yang setara.

Estimasi masa manfaat ditelaah minimal setiap akhir tahun pelaporan dan diperbarui jika ekspektasi berbeda dari estimasi sebelumnya dikarenakan pemakaian dan kerusakan fisik, keusangan secara teknis atau komersial dan hukum atau pembatasan lain atas penggunaan dari aset serta perkembangan teknologi. Namun demikian, adalah mungkin, hasil dimasa depan dari operasi dapat dipengaruhi secara material oleh perubahan-perubahan dalam estimasi yang diakibatkan oleh perubahan faktor-faktor yang disebutkan di atas, dan karenanya biaya penyusutan masa depan mungkin direvisi.

Biaya perolehan aset tetap disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomisnya. Manajemen mengestimasi masa manfaat ekonomis aset tetap antara 4 sampai dengan 20 tahun. Ini adalah umur yang secara umum diharapkan dalam industri dimana Grup menjalankan bisnisnya.

Pengaturan Bersama

Pertimbangan diperlukan untuk menentukan ketika Entitas memiliki pengendalian bersama atas suatu pengaturan, yang memerlukan penilaian terhadap kegiatan yang relevan dan ketika keputusan sehubungan dengan kegiatan tersebut mensyaratkan persetujuan suara bulat. Entitas menentukan bahwa kegiatan yang relevan untuk pengaturan bersama adalah mereka yang berkaitan dengan keputusan keuangan, operasi dan modal dari pengaturan. Pertimbangan dibuat dalam menentukan pengendalian bersama adalah serupa dengan yang diperlukan untuk menentukan pengendalian terhadap Entitas Anak, sebagaimana tercantum dalam PSAK 65 "Laporan Keuangan Konsolidasian".

Pertimbangan juga diperlukan untuk mengklasifikasikan pengaturan bersama. Mengklasifikasikan pengaturan mengharuskan Entitas untuk menilai hak dan kewajiban yang timbul dari pengaturan. Secara khusus Entitas mempertimbangkan:

- Struktur pengaturan bersama - apakah pengaturan bersma tersebut terstruktur melalui kendaraan terpisah.
- Ketika pengaturan terstruktur melalui kendaraan terpisah, Entitas juga mempertimbangkan hak dan kewajiban yang timbul dari:
  - bentuk hukum dari kendaraan terpisah.
  - persyaratan kontraktual dalam pengaturan.
  - fakta lain yang relevan dan keadaan.

Penilaian sering membutuhkan pertimbangan yang signifikan. Sebuah kesimpulan yang berbeda tentang pengendalian bersama dan apakah pengaturan adalah operasi bersama atau ventura bersama, dapat mempengaruhi akuntansi secara material.

4. PENGGUNAAN ESTIMASI, PERTIMBANGAN DAN ASUMSI MANAJEMEN (Lanjutan)

Pengaturan Bersama (Lanjutan)

Menentukan Pajak Penghasilan

Pertimbangan signifikan dilakukan dalam menentukan provisi atas pajak penghasilan badan.Terdapat transaksi dan perhitungan tertentu yang penentuan pajak akhirnya adalah tidak pasti sepanjang kegiatan usaha normal. Entitas mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi apakah akan terdapat tambahan pajak penghasilan badan. Dalam situasi tertentu, Entitas tidak dapat menentukan secara pasti jumlah liabilitas pajak mereka pada saat ini atau masa depan karena proses pemeriksaan, atau negosiasi dengan otoritas perpajakan.

Ketidakpastian timbul terkait dengan interpretasi dari peraturan perpajakan yang kompleks serta jumlah dan waktu dari penghasilan kena pajak di masa depan. Dalam menentukan jumlah yang harus diakui terkait dengan liabilitas pajak yang tidak pasti, Entitas menerapkan pertimbangan yang sama yang akan mereka gunakan dalam menentukan jumlah cadangan yang harus diakui sesuai dengan PSAK 57 (Revisi 2009) "Provisi, Liabilitas Kontijensi dan Aset Kontijensi". Entitas membuat analisis untuk semua posisi pajak terkait dengan pajak penghasilan untuk menentukan jika liabilitas pajak untuk manfaat pajak yang belum diakui harus diakui.

Entitas menelaah aset pajak tangguhan pada setiap tanggal pelaporan dan mengurangi nilai tercatat sepanjang tidak ada kemungkinan bahwa laba kena pajak memadai untuk mengkompensasi sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan. Entitas juga menelaah waktu yang diharapkan dan tarif pajak atas pemulihan perbedaan temporer dan menyesuaikan pengaruh atas pajak tangguhan yang sesuai.

Estimasi Beban Pensiun dan Imbalan Kerja

Penentuan liabilitas atas pensiun dan kewajiban imbalan kerja Grup bergantung pada pemilihan asumsi yang digunakan oleh aktuaris independen dalam menghitung jumlah-jumlah tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain, tingkat diskonto, tingkat kenaikan gaji tahunan, tingkat pengunduran diri karyawan tahunan, tingkat kecacatan, umur pensiun dan tingkat kematian.

Sementara Grup berkeyakinan bahwa asumsi tersebut adalah wajar dan sesuai, perbedaan signifikan pada hasil aktual atau perubahan signifikan dalam asumsi yang ditetapkan Grup dapat mempengaruhi secara material liabilitas diestimasi atas pensiun dan imbalan kerja dan beban imbalan kerja neto.

5. KAS DAN SETARA KAS

Akun ini terdiri dari:

	2020	2019
Kas	32.401.062	40.560.348
Bank Rupiah:		
PT Bank Central Asia, Tbk	1.075.532.235	1.213.620.699
PT Bank Negara Indonesia (Persero),Tbk	332.798.871	1.233.969.804
PT Bank Jawa Barat	204.934.986	439.512.559
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk	36.139.037	43.570.143
Jumlah	1.681.806.191	2.971.233.553

Tidak ada saldo kas dan setara kas yang dibatasi penggunaanya dan yang ditempatkan pada pihak berelasi.

6. PIUTANG USAHA

Akun ini terdiri dari:

	2020	2019
Guest	226.122.613	535.963.515
Guest ledger	16.981.708	138.099.378
BNI card	3.134.400	6.083.767
OTA	9.658.500	5.759.600
BCA card	3.813.496	1.917.149
Jumlah	259.710.717	687.823.409

Rincian piutang usaha berdasarkan umur piutang adalah sebagai berikut:

	2020	2019
Sampai dengan 1 bulan	259.710.717	687.823.409
Jumlah	259.710.717	687.823.409

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, semua piutang usaha Grup merupakan piutang dalam mata uang Rupiah. Manajemen Grup berpendapat bahwa seluruh piutang usaha tersebut dapat tertagih, sehingga tidak perlu dibuat cadangan kerugian penurunan nilai piutang.

7. PERSEDIAAN

Akun ini terdiri dari:

	2020	2019
Food	38.235.838	41.387.718
Pengharum & Pembersih	5.386.144	7.181.898
Fruit & Beverage	4.960.489	11.624.195
Gas	2.432.521	6.052.507
Cleaning & Chemical	-	19.000.000
Jumlah	51.014.992	85.246.318

7. PERSEDIAAN (Lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 tidak terdapat persediaan Perusahaan yang diasuransikan. Berdasarkan hasil penelaahan terhadap keadaan persediaan pada akhir tahun, manajemen berpendapat bahwa pada tahun 2020 dan 2019, tidak terdapat penurunan nilai persediaan dan barang usang, sehingga tidak perlu dibentuk penyisihan berkaitan dengan hal tersebut.

8. ASET TETAP

Akun ini terdiri dari:

	2020			
	Saldo awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo akhir
Harga perolehan				
Tanah	16.259.000.000	-	-	16.259.000.000
Bangunan	30.783.750.000	40.450.000	-	30.824.200.000
Convention hall	6.638.400.000	5.283.790.100	-	11.922.190.100
Prasarana	5.894.495.993	-	-	5.894.495.993
Mesin dan peralatan	1.202.269.800	215.000.000	-	1.417.269.800
Kendaraan	992.757.037	-	-	992.757.037
Perlengkapan & perabotan	4.036.677.270	1.172.274.300	-	5.208.951.570
Jumlah	65.807.350.100	6.711.514.400	-	72.518.864.500
Akumulasi penyusutan				
Bangunan	3.976.234.375	1.539.187.500	-	5.515.421.875
Convention hall	-	530.062.129	-	530.062.129
Prasarana	1.870.514.331	736.811.999	-	2.607.326.330
Mesin dan peralatan	388.232.956	174.762.892	-	562.995.848
Kendaraan	140.973.745	125.919.005	-	266.892.750
Perlengkapan & perabotan	2.396.882.178	1.251.021.098	-	3.647.903.276
Jumlah	8.772.837.585	4.357.764.623	-	13.130.602.208
Nilai buku	57.034.512.515			59.388.262.292

	2019			
	Saldo awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo akhir
Harga perolehan				
Tanah	6.287.000.000	9.972.000.000	-	16.259.000.000
Bangunan	30.783.750.000	-	-	30.783.750.000
Convention hall	-	6.638.400.000	-	6.638.400.000
Prasarana	5.894.495.993	-	-	5.894.495.993
Mesin dan peralatan	1.202.269.800	-	-	1.202.269.800
Kendaraan	221.672.197	771.084.840	-	992.757.037
Perlengkapan & perabotan	3.829.916.330	206.760.940	-	4.036.677.270
Jumlah	48.219.104.320	17.588.245.780	-	65.807.350.100
Akumulasi penyusutan				
Bangunan	2.437.046.875	1.539.187.500	-	3.976.234.375
Prasarana	1.133.702.332	736.811.999	-	1.870.514.331
Mesin dan peralatan	237.949.231	150.283.725	-	388.232.956
Kendaraan	46.761.216	94.212.529	-	140.973.745
Perlengkapan & perabotan	1.418.993.944	977.888.234	-	2.396.882.178
Jumlah	5.274.453.598	3.498.383.987	-	8.772.837.585
Nilai buku	42.944.650.722			57.034.512.515

8. ASET TETAP (Lanjutan)

Beban penyusutan pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 dengan rincian sebagai berikut:

	2020	2019
Beban pokok pendapatan	2.926.783.203	2.210.313.314
Beban umum dan administrasi	1.430.981.419	1.288.070.673
Jumlah	4.357.764.623	3.498.383.987

Tanah, bangunan dan convention hall milik PT Bumi Majalengka Permai, entitas anak, luas tanah 5.357m2 dengan bukti kepemilikan Sertifikat SHGB No. 00212 luas 3.037m2, SHGB No. 00213 luas 1.190m2, SHGB No. 00214 luas 1.130m2 dan bangunan milik PT Bumi Majalengka berupa bangunan Hotel Fitra Majalengka 3 lantai dengan 113 kamar dengan luas bangunan 3.900m2 yang terletak di Jl. KH. Abdul Hamid, Kel, Majalengka Kulon, Kec, Majalengka, Jawa Barat. Tanah dan bangunan digunakan sebagai jaminan untuk pinjaman yang diperoleh PT Bumi Majalengka Permai dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (Catatan 15).

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 aset tetap kendaraan telah diasuransikan kepada BCA Insurance dengan nilai pertanggungan sebesar Rp707.950.000 dan Rp908.824.000, gedung, mesin, persediaan, perlengkapan hotel dan kantor, per tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 diasuransikan kepada PT Asuransi Tri Pakarta (pihak ketiga) dengan nilai pertanggungan masing-masing sebesar Rp38.197.760.000, convention hall per tanggal 31 Desember 2020 diasuransikan kepada PT Asuransi Tri Pakarta dengan nilai pertanggungan sebesar Rp7.091.500.000. Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan telah cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas risiko tersebut.

Tidak terdapat aset tetap yang sudah disusutkan penuh namun masih digunakan untuk menunjang operasional Perseroan, tidak terdapat asset tetap yang tidak dipakai sementara, tidak terdapat asset tetap yang berasal dari hibah dan yang dihentikan dari penggunaan aktif, dan tidak terdapat asset tetap yang tidak diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual.

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap nilai yang dapat diperoleh kembali dari aset tetap, manajemen Perusahaan berkeyakinan bahwa tidak ada kejadian-kejadian atau perubahan-perubahan yang mengindikasikan adanya penurunan nilai aset pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

9. UTANG USAHA

Akun ini terdiri dari:

	2020	2019
Utang supplier	1.236.113.633	124.659.369
Lain-lain	60.000	60.000
Jumlah	1.236.173.633	124.719.369

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, semua utang usaha Perusahaan merupakan utang dalam mata uang Rupiah.

10. UTANG PAJAK

Akun ini terdiri dari:

	2020	2019
Pajak pembangunan 1	58.736.678	155.534.107
Jumlah	58.736.678	155.534.107

11. BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR

Akun ini terdiri dari:

	2020	2019
Service charge	1.032.105.019	820.937.034
BPJS	19.824.258	54.864.642
Lain-lain	40.418.000	40.418.000
Jumlah	1.092.347.277	916.219.676

12. UTANG LAIN-LAIN

Akun ini terdiri dari:

	2020	2019
Deposit pelanggan	1.335.833.500	41.792.000
Deposit voucher	35.798.732	35.798.732
Deposit transfer	117.136.057	2.302.000
Jumlah	1.488.768.289	79.892.732

13. UTANG PEMEGANG SAHAM

Akun ini terdiri dari:

	2020	2019
Jon Fieris	1.000.000.000	-
Jumlah	1.000.000.000	-

Berdasarkan perjanjian yang dibuat pada tanggal 3 November 2020, Utang kepada Jon Fieris merupakan pinjaman Perusahaan yang dipergunakan untuk modal kerja Perusahaan, dengan bunga 5% per tahun (dibayarkan setiap bulan) dan jangka waktu 1 tahun (365 hari) terhitung sejak tanggal Perjanjian.

14. UTANG SEWA PEMBIAYAAN

Utang sewa pembiayaan merupakan utang kepada PT BCA Finance atas pembelian kendaraan oleh PT Bumi Majalengka Permai, entitas anak, dengan rincian sebagai berikut:

	2020	2019
Liabilitas – awal	403.744.333	69.032.889
Liabilitas yang timbul selama tahun berjalan	-	527.350.000
Jumlah	403.744.333	596.382.889
Penyelesaian selama tahun berjalan	227.791.550	192.638.556
Liabilitas – akhir	175.952.783	403.744.333
Liabilitas jatuh tempo dalam setahun	167.095.839	227.791.550
Liabilitas jangka panjang	8.856.944	175.952.783

Utang sewa pembiayaan ini dikenai bunga berkisar 3,6% - 8,67% flat p.a

Beban bunga dari utang sewa pembiayaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, disajikan sebagai "beban bunga" dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

15. UTANG BANK

Akun ini terdiri dari:

	2020	2019
PT Bank Negara Indonesia (persero) Tbk		
Kredit Investasi - 1	18.033.100.000	19.033.100.000
Kredit Investasi - 3	8.380.000.000	2.138.400.000
Jumlah	26.413.100.000	21.171.500.000
Utang bank bagian yang jatuh tempo dalam waktu 1 (satu) tahun:		
Kredit Investasi - 1	2.250.000.000	3.800.000.000
Kredit Investasi - 3	450.000.000	125.000.000
Jumlah	2.700.000.000	3.925.000.000
Jumlah utang bank jangka panjang	23.713.100.000	17.246.500.000

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Berdasarkan perjanjian kredit No. 16.059 pada tanggal 27 April 2016. PT Bumi Majalengka Permai memperoleh fasilitas kredit dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, dengan rincian fasilitas sebagai berikut:

15. UTANG BANK (Lanjutan)

Kredit Investasi (Baru)

Fasilitas Term Loan (TL), dengan tujuan fasilitas untuk pembangunan Hotel Fitra di Jl. KH. Abdul Halim RT005 RW008, Kelurahan Majalengka Kulon, Kecamatan Majalengka, Kabupaten Majalengka.

Maksimum	: Rp25.000.000.000
Bentuk	: Aflopend
Availability period	: 18 (delapan belas) bulan sejak tanggal penandatangan PK
Jangka waktu	: 96 (Sembilan puluh enam) bulan sejak tanggal penandatanganan PK, termasuk 18 bulan grace periode selama masa pembangunan dan operasional awal.
Bunga	: 12,75%
Commitment fee	: 1% dari maksimum kredit
Biaya administrasi	: Rp10.000.000
Jaminan	:

1. Sebidang tanah yang terletak di Jl. KH. Abdul Hamid, Kelurahan Majalengka Kulon, Kecamatan Majalengka, Bukti kepemilikan :
   - HGB No. 00212 tanggal 27 Agustus 2018 atas nama PT Bumi Majalengka Permai
   - IMB No. 644.2/18/BPPTPM/I/2015 tanggal 26 Januari 2015
   - KJPP Bambang & Ernasapta No. BEST-051/BLP/II/2016 tanggal 11 Februari 2016
   - Akan diikat HT I sebesar Rp32.750 juta
   - Akan ditutup asuransi construction all risk selama masa pembangunan
   - Akan ditutup asuransi kebakaran setelah bangunan selesai dibangun (nilai penutupan akan disesuaikan pada saat bangunan selesai dibangun).
2. Project Cost Bangunan Hotel Fitra Majalengka 3 lantai dengan 101 kamar berikut perlengkapan hotel. Cfm. Feasibility Study Project Cost Hotel Fitra Majalengka.
   - Laporan Studi Kelayakan PT Kusuma Real Sakti No. KRS-08/BLP-FS/II/2016 tanggal 22 Februari 2016
3. Sebidang tanah yang terletak di Jl. Siti Aminah, Kelurahan Majalengka Kulon, Kecamatan Majalengka, Jawa Bukti kepemilikan :
   - HGB No. 00213 tanggal 06 September 2019 atas nama PT Bumi Majalengka Permai
   - HGB No. 00214 tanggal 06 September 2019 atas nama PT Bumi Majalengka Permai
   - KJPP Bambang & Ernasapta No. BEST 083/BLP/III/2016 tanggal 14 Maret 2016
   - Akan diikat HT I sebesar Rp9.744 juta
4. Akan dilakukan pengikatan Personel Guarentee atas nama Jon Fieris.
5. Akan dilakukan pengikatan Company Guarentee atas nama Askap Future.

Berdasarkan perjanjian kredit No. 16.062 pada tanggal 27 April 2016. Perusahaan memperoleh fasilitas kredit dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, dengan tujuan fasilitas untuk pembayaran sebagian bunga selama masa pembangunan Hotel Fitra di Jl. KH. Abdul Halim RT005 RW008, Kelurahan Majalengka Kulon, Kecamatan Majalengka, Kabupaten Majalengka.

Maksimum	: Rp1.500.000.000
Bentuk	: Aflopend
Jangka waktu	: 42 (empat puluh dua) bulan sejak tanggal penandatanganan PK, termasuk 18 bulan masa penarikan KI IDC.

15. UTANG BANK (Lanjutan)

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (lanjutan)

Kredit Investasi (Baru) (Lanjutan)

Bunga : 12,75%
Commitment fee : 1% dari maksimum kredit
Biaya administrasi : Rp5.000.000
Jaminan :

1. Sebidang tanah yang terletak di Jl. KH. Abdul Hamid, Kelurahan Majalengka Kulon, Kecamatan Majalengka, Bukti kepemilikan :
   - HGB No. 00212 tanggal 27 Agustus 2018 atas nama PT Bumi Majalengka Permai
   - IMB No. 644.2/18/BPPTPM/I/2015 tanggal 26 Januari 2015
   - KJPP Bambang & Ernasapta No. BEST-051/BLP/II/2016 tanggal 11 Februari 2016
   - Akan diikat HT I sebesar Rp32.750 juta
   - Akan ditutup asuransi construction all risk selama masa pembangunan
   - Akan ditutup asuransi kebakaran setelah bangunan selesai dibangun (nilai penutupan akan disesuaikan pada saat bangunan selesai dibangun).
2. Project Cost Bangunan Hotel Fitra Majalengka 3 lantai dengan 101 kamar berikut perlengkapan hotel. Cfm. Feasibility Study Project Cost Hotel Fitra Majalengka.
   - Laporan Studi Kelayakan PT Kusuma Real Sakti No. KRS-08/BLP-FS/II/2016 tanggal 22 Februari 2016
3. Sebidang tanah yang terletak di Jl. Siti Aminah, Kelurahan Majalengka Kulon, Kecamatan Majalengka, Jawa Bukti kepemilikan :
   - HGB No. 00213 tanggal 06 September 2019 atas nama PT Bumi Majalengka Permai
   - HGB No. 00214 tanggal 06 September 2019 atas nama PT Bumi Majalengka Permai
   - KJPP Bambang & Ernasapta No. BEST 083/BLP/III/2016 tanggal 14 Maret 2016
   - Akan diikat HT I sebesar Rp9.744 juta
4. Akan dilakukan pengikatan Personel Guarentee atas nama Jon Fieris.
5. Akan dilakukan pengikatan Company Guarentee atas nama Askap Future.

Kredit Investasi (Tambahan)

Berdasarkan surat persetujuan tambahan struktur fasilitas kredit No. JRM/1/402/R pada tanggal 25 Juli 2019. Perusahaan memperoleh fasilitas kredit tambahan dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, dengan tujuan fasilitas untuk pembangunan Aula (Meeting Room) dan lahan parker, di Jl. KH. Abdul Halim RT005 RW008, Kelurahan Majalengka Kulon, Kecamatan Majalengka, Kabupaten Majalengka.

Maksimum : Rp9.000.000.000
Bentuk : Aflopend
Jangka waktu : 84 (delapan puluh empat) bulan sejak tanggal penandatanganan PK, termasuk 12 bulan grace period selama masa pembangunan dan operasional awal.

Bunga : 12,75%
Commitment fee : 1% dari maksimum kredit

15. UTANG BANK (Lanjutan)

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (lanjutan)

Kredit Investasi (Tambahan) (Lanjutan)

Biaya administrasi : Rp10.000.000
Jaminan :

1. Sebidang tanah yang terletak di Jl. KH. Abdul Hamid, Kelurahan Majalengka Kulon, Kecamatan Majalengka,
   Bukti kepemilikan :
   - HGB No. 00212 tanggal 27 Agustus 2018 atas nama PT Bumi Majalengka Permai
   - IMB No. 644.2/18/BPPTPM/I/2015 tanggal 26 Januari 2015
2. Dua bidang tanah berikut bangunan Convention Hall diatasnya yang terletak di Jl. Siti Aminah, Kelurahan Majalengka Kulon, Kecamatan Majalengka, Jawa Barat.
   Bukti kepemilikan :
   - HGB No. 00213 & No. 00214 atas nama PT Bumi Majalengka Permai
   - IMB No. 645/145/DPMPTSP/IV/2018 tanggal 12 April 2018
3. Akan dilakukan pengikatan Personel Guarentee atas nama Jon Fieris.
4. Akan dilakukan pengikatan Company Guarentee atas nama Askap Future.

Berdasarkan surat keputusan kredit (persetujuan restrukturisasi) dalam kondisi wabah Covid-19 No.JRM/1/369/R pada tanggal 22 Mei 2020. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk menyetujui restrukturisasi fasilitas kredit Perusahaan dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

1. Suku bunga 11,25% per tahun berlaku selama 12 bulan dengan pembebanan sebagai berikut:
   - 8% (delapan persen) per tahun efektif dan sisanya 3,25% (tiga koma dua pulh lima persen) per tahun dibayarkan setelah IBP berakhir, berlaku sejak tanggal 26 Mei 2020. tarif bunga ini akan direview pada 3 (tiga) bulan pertama, selanjutnya akan direview setiap saat untuk disesuaikan dengan kondisi usaha, serta syarat dan ketrentuan yang berlaku di BNI.
   - Jangka waktu IBP 12 (dua belas) bulan sejak penandatanganan Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit (PPPK).
   - Jangka waktu angsuran IBP adalah 24 (dua puluh empat) bulan sejak masa IBP berakhir.
2. *Interest Baloon Payment* (IBP) Kredit Investasi
   Maksimum kredit : Rp30.103.160 dan setiap bulan akan diupdate dan diakumulasi sesuai dengan realisasi pada saat pendudukan IBP.
   Keperluan : Pembebanan selisih bunga kredit investasi selam 12 bulan sejak penandatangan PPPK.
   Bentuk : Aflopend
   Jangka waktu : 12 bulan sejak masa IBP terakhir
   Booking office : BNI KC Senayan
3. Perpanjangan jangka waktu grace period atas fasilitas kredit investasi maksimum kredit Rp9.000.000.000 semula grace period atau dalam hal ini sampai dengan Juli 2020, menjadi sampai dengan April 2021.

4. Perpanjangan jatuh tempo jangka waktu atas fasilitas kredit investasi
   - Kredit investasi Rp25.000.000.000 semula sampai dengan April 2024 menjadi sampai dengan April 2025
   - Kredit investasi Rp9.000.000.000 semula sampai dengan April 2026 menjadi sampai dengan April 2027

15. UTANG BANK (Lanjutan)

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (lanjutan)

Berdasarkan surat keputusan kredit (persetujuan restrukturisasi) dalam kondisi wabah Covid-19 No.JRM/1/369/R pada tanggal 22 Mei 2020. PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk menyetujuin restrukturisasi fasilitas kredit Perusahaan dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut: (lanjutan)

5. Lain-lain
   - Restrukturisasi kredit dilakukan dalam rangka penyelamatan.
   - Apabila terdapat excess cash, wajib melakukan setoran untuk mengurangi utang pokok dan akan mengurangi kewajiban pokok bulan terakhir.
   - Wajib optimalkan produk BNI lainnya
   - Lain-lain sesuai SKK Nomor JRM/1/292/R tanggal 14 April 2016 untuk fasilitas kredit investasi maksimum Rp25.000.000.000 dan SKK Nomor JRM/1/402/R tanggal 25 Juli 2019 untk fasilitas kredit investasi maksimum Rp9.000.000.000

Berdasarkan surat No. JRM/1/215 PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

a. Selama pinjaman terhadap PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk belum dilunasi, tanpa persetujuan tertulis PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bumi Majalengka Permai dilarang melakukan aktivitas antara lain:
   - Membagi laba usaha dan membayar dividen kepada pemegang.
   - Mengubah bentuk atau status hukum Perusahaan, merubah anggaran dasar (kecuali meningkatkan modal perusahaan), memindahkan resipis atau saham Perusahaan baik antar pemegang saham maupun kepada pihak lain yang mengakibatkan perubahan pemegang saham dominan (*ultimate shareholder*), hal ini dapat disetujui atas perubahan pemegang saham PT Bumi Majalengka Permai yang mana tidak mengakibatkan perubahan pemegang saham dominan (*ultimate shareholder*).
b. Restrukturisasi atas Pemegang Saham dan Pengurus Perusahaan dapat dilakukan kepada pemegang saham dan pengurus yang sudah listing (tercatat di bursa saham) dengan syarat memiliki kompetensi di bidangnya (perhotelan dan wisata.)
c. Permohonan pencabutan Personal dan *Corporate Guarantee* tidak dapat dilakukan karena Perseroan belum menghasilkan laba dan masih bergantung pada pemegang saham.
d. Hasil dana IPO, hanya digunakan untuk pengembangan usaha dan bukan untuk melunasi utang pemegang saham.
e. Melakukan marger akuisisi atau reorganisasi atau investasi/peyertaan pada perusahaan lain, dapat dilakukan selama Marger, Akuisisi, tidak akan merubah pemegang saham dominan (*ultimate shareholder*).

f. Menerbitkan/mejual saham kecuali di konversi menjadi modal, yang dibuat secara Notariil, Dapat dilakukan karena penjualan saham untuk kepentingan ekspansi bisnis yang akan memperkuat struktur modal dan tidak akan mengubah struktur pemegang saham dominan (*ultimate shareholder*).

Beban bunga dari utang bank untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019, disajikan sebagai "beban bunga" dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

16. MODAL SAHAM

Berdasarkan akta No. 19 dari notaris Rudy Siswanto, S.H., notaris di Jakarta Utara, tanggal 23 April 2018, dan telah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0057485.AH.01.11.Tahun 2018, tanggal 23 April 2018, para pemegang saham menyatakan, menyetujui peningkatan modal dasar Perusahaan yang semula Rp2.000.000.000 menjadi sebesar Rp100.000.000.000 dan modal ditempatkan/modal disetor yang semula Rp500.000.000 menjadi sebesar Rp28.000.000.000, yang mana penambahan modalnya sebesar Rp27.500.000.000 diambil bagian oleh para pemegang saham sebagai berikut:

a. PT Gloria Inti Nusantara sebanyak 220.000 saham dengan bernilai nominal seluruhnya sebesar Rp22.000.000.000
b. Tn. Jon Fieris sebanyak 55.000 saham, dengan bernilai nominal seluruhnya sebesar Rp5.500.000.000

Akta No. 26 dari notaris Rudy Siswanto, S.H., notaris di Jakarta Utara, tanggal 28 Mei 2018, dan telah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0080364.AH.01.11.Tahun 2018, tanggal 08 Juni 2018, para pemegang saham menyatakan, menyetujui modal dasar Perusahaan sebesar Rp100.000.000.000 terbagi atas 1.000.000.000 saham masing-masing saham bernilai nominal Rp100.

Berdasarkan akta No. 50 dari notaris Rudy Siswanto S.H., notaris di Jakarta Utara, tanggal 26 Desember 2018, dan telah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0177930.AH.01.11.Tahun 2018, tanggal 27 Desember 2018, mengenai pernyataan keputusan edaran para pemegang saham antara lain berkaitan dengan:

a. Menyetujui untuk mengalihkan/mengoperkan hak-hak atas saham Perusahaan milik PT Gloria Inti Nusantara, kepada Ivan Sindoro berdasarkan Akta Jual Beli saham dibawah tangan bermaterai cukup No. 326/REG/XII/2018 tanggal 26 Desember 2018 sebanyak 50.958.000 (lima puluh juta sembilan ratus lima puluh delapan) lembar saham dengan presentase kepemilikan 13,41%, kepada Rudy Gunawan berdasarkan Akta Jual Beli saham dibawah tangan bermaterai cukup No. 327/REG/XII/2018 tanggal 26 Desember 2018 sebanyak 43.042.000 (empat puluh tiga juta empat puluh dua ribu) lembar saham dengan presentase kepemilikan 11,33%, dan kepada Hendra Sutanto berdasarkan Perjanjian Pengoperan Hak-hak Atas Saham dibawah tangan bermaterai cukup No.328/REG/XII/2018 tanggal 26 Desember 2018 sebanyak 30.000.000 (tiga puluh juta) lembar saham dengan presentase kepemilikan 7,89%.

b. Meningkatkan modal ditempatkan/disetor dalam Perseroan menjadi sebanyak 380.000.000 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp38.000.000.000 yang berasal berasal dari kapitalisasi pinjaman dari pemegang saham/konversi piutang pemegang saham yaitu piutang Jon Fieris kepada Perseroan berdasarkan Surat Pengakuan utang dengan konversi tanggal 21 Desember 2018 sebesar Rp2.000.000.000 (dua miliar Rupiah), piutang PT Gloria Inti Nusantara dengan Perseroan berdasarkan Surat Pengakuan utang pada tanggal 21 Desember 2018 sebesar Rp8.000.000.000 (delapan miliar Rupiah).

Berdasarkan akta No. 05 dari notaris Rudy Siswanto S.H., notaris di Jakarta Utara, tanggal 18 Juni 2019, dan telah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0095307.AH.01.11.Tahun 2019, tanggal 20 Juni 2019, mengenai kepastian jumlah saham dan perubahan anggaran dasar dalam rangka penawaran umum perdana, menyatakan modal ditempatkan/disetor dalam Perseroan sejumlah 600.000.000 (enam ratus juta) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp60.000.000.000 (enam puluh miliar Rupiah).

16. MODAL SAHAM (Lanjutan)

Susunan pemegang saham Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 berdasarkan catatan administrasi yang dikelola oleh PT Lotus Andalan Sekuritas, Biro Administrasi Efek, adalah sebagai berikut:

Pemegang saham	Jumlah saham	Persentase kepemilikan (%)	Jumlah (Rp)
PT Gloria Inti Nusantara	180.000.000	30,00%	18.000.000.000
Tn. Jon Fieris	76.000.000	12,67%	7.600.000.000
Tn. Ivan Sindoro	50.958.000	8,49%	5.095.800.000
Tn. Rudy Gunawan	43.042.000	7,17%	4.304.200.000
Tn. Hendra Sutanto	30.000.000	5,00%	3.000.000.000
Masyarakat	220.000.000	36,67%	22.000.000.000
Jumlah	600.000.000	100,00%	60.000.000.000

Pengelolaan Modal

Tujuan utama pengelolaan modal Grup adalah untuk memastikan pemeliharaan rasio modal yang sehat untuk mendukung usaha dan memaksimalkan imbalan bagi pemegang saham.

Grup dipersyaratkan oleh Undang-undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 untuk menyisihkan dan mempertahankan suatu dana cadangan yang tidak boleh didistribusikan sampai dana cadangan tersebut mencapai 20% dari modal saham diterbitkan dan dibayar penuh.

Grup berkomitmen untuk persyaratan permodalan eksternal tersebut membentuk cadangan sesuai dengan Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 70 saat Perseroan telah dapat membukukan laba ditahan.

Kebijakan Grup adalah mempertahankan struktur permodalan yang sehat untuk mengamankan akses terhadap pendanaan pada biaya yang wajar, antara lain dengan memonitor permodalan menggunakan rasio debt to equity dan rasio gearing.

17. TAMBAHAN MODAL DISETOR

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, rincian akun tambahan modal disetor adalah sebagai berikut:

Akun ini terdiri dari:

	2020	2019
Agio saham yang berasal dari penawaran umum perdana saham	440.000.000	440.000.000
Biaya emisi saham dari penawaran umum perdana saham	(2.163.709.962)	(2.163.709.962)
Selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali		
PT Bumi Majalengka Permai	(9.434.766.802)	(9.434.766.802)
PT Fitra Amanah Wisata	(50.140.269)	(50.140.269)
Jumlah	(11.208.617.033)	(11.208.617.033)

17. TAMBAHAN MODAL DISETOR (Lanjutan)

Berdasarkan akta notaris Rudy Siswanto No 25 tanggal 24 April 2018 entitas induk membeli saham PT Bumi Majalengka Permai dari PT Gloria Inti Nusantara dan Jon Fieris, pemegang saham, yang merupakan pihak yang berada dalam pengendalian yang sama, dengan harga beli sebesar nilai nominal saham Rp5.999.982.857 sehingga kepemilikan Perusahaan pada PT Bumi Majalengka permai sebesar 99,9997%.

Nilai buku aset neto PT Bumi Majalengka Permai yang dibeli oleh entitas induk pada pembelian saham diatas sebesar Rp3.434.783.945. Selisih antara harga beli saham dengan nilai buku aset neto sebesar Rp9.434.766.802 dicatat sebagai selisih nilai transaksi entitas sepengendali.

Berdasarkan akta notaris Rudy Siswanto No 25 tanggal 24 April 2018 entitas induk membeli saham PT Fitra Amanah Wisata dari PT Bumi Majalengka Permai dan Go Ronny Nugroho pemegang saham PT Gloria Inti Nusantara, yang merupakan pihak yang berada dalam pengendalian yang sama, dengan harga beli sebesar nilai nominal saham Rp249.900.000 sehingga kepemilikan Perusahaan pada PT Fitra Amanah Wisata sebesar 99,96%.

Nilai buku aset neto PT Fitra Amanah Wisata yang dibeli oleh entitas induk pada pembelian saham diatas sebesar Rp199.759.731. Selisih antara harga beli saham dengan nilai buku aset neto sebesar Rp50.140.269 dicatat sebagai selisih nilai transaksi entitas sepengendali.

18. KEPENTINGAN NON PENGENDALI

Akun ini terdiri dari:

	2020	2019
PT Bumi Majalengka Permai	67.165	80.203
PT Fitra Amanah Wisata	8.298	20.263
Jumlah	75.464	100.467

19. IMBALAN PASCA KERJA

Grup mencatat estimasi liabilitas atas imbalan kerja karyawan pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 berdasarkan perhitungan aktuarial yang dilakukan oleh PT Binaputera Jaga Hikmah, aktuaris independen, berdasarkan laporannya pada tanggal 26 Pebruari 2021 dan 15 Januari 2020, yang menggunakan metode *"Projected Unit Credit",*

Asumsi-asumsi pokok yang digunakan dalam perhitungan aktuaria tersebut adalah sebagai berikut:

	2020	2019
Tingkat diskonto	6,88%	7,82%
Tingkat kenaikan gaji	10%	10%
Tabel mortalita	(TMI) IV – 2019	(TMI) III – 2011
Proporsi pengambilan pensiun normal	60 tahun	60 tahun
Metode	*Projected Unit Credit*	

19. IMBALAN PASCA KERJA (Lanjutan)

Analisis liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan yang disajikan sebagai "Estimasi Liabilitas atas Imbalan Kerja Karyawan" di laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, dan beban imbalan kerja karyawan yang dicatat dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, adalah sebagai berikut:

Liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan

	2020	2019
Nilai kini liabilitas imbalan kerja	928.417.021	217.253.827
Nilai bersih liabilitas yang diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasian	928.417.021	217.253.827

Beban imbalan kerja karyawan yang diakui laporan laba rugi komprehensif adalah:

	2020	2019
Biaya jasa kini	291.912.448	99.667.235
Biaya bunga	9.937.013	4.726.562
Jumlah	301.849.461	104.393.797

Mutasi estimasi liabilitas imbalan kerja adalah sebagai berikut:

	2020	2019
Saldo awal	217.253.827	99.830.929
Beban manfaat karyawan	301.849.461	104.393.797
Pengakuan segera dari biaya jasa lalu	363.642.274	-
(Keuntungan) kerugian aktuarial	45.671.459	13.029.101
Liabilitas imbalan kerja	928.417.021	217.253.827

Manajemen berkeyakinan bahwa estimasi liabilitas tersebut di atas cukup untuk memenuhi ketentuan yang berlaku.

Tabel berikut menyajikan sensitivitas atas kemungkinan perubahan tingkat suku bunga pasar dan tingkat kenaiakan gaji, dengan variabel lain dianggap tetap, terhadap liabilitas imbalan pascakerja pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019:

		Liabilitas imbalan pasca kerja	
Asumsi	Perubahan asumsi	2020	2019
Tingkat diskonto	+ 1%	811.475.331	181.067.456
	- 1%	1.072.980.566	263.171.588
Tingkat kenaikan gaji	+ 1%	1.067.219.589	261.695.125
	- 1%	813.403.439	181.415.702

20. PENDAPATAN

Akun ini terdiri dari:

	2020	2019
Hotel	2.667.927.633	5.268.984.025
Breakfast	1.038.182.463	1.915.919.343
Banquet	1.237.744.394	1.157.332.002
Food & beverage	309.725.491	663.702.851
Laundry	72.478.721	196.682.003
Transportasi	49.907.902	166.002.917
Lainnya	21.402.500	115.898.306
Jumlah	5.397.369.104	9.484.521.447

Perseroan mengelola hotel yang sama dengan yang dikelola oleh entitas anak "PT Bumi Majalengka Permai", yaitu Hotel Fitra.

21. BEBAN POKOK PENDAPATAN

Akun ini terdiri dari:

	2020	2019
Penyusutan	2.926.783.203	2.210.313.314
Food & beverage	956.035.516	1.418.473.364
Telephone, listrik dan internet	723.443.513	979.754.654
Gas dan solar	76.535.886	113.280.343
Ammeneties	73.905.500	278.122.820
Pengharum dan pembersih	71.155.111	98.057.371
Air	70.094.942	111.686.372
BBM, tol dan parker	35.488.538	117.786.759
Pest control	22.679.958	20.999.979
Tissue	15.644.168	15.915.477
Pengiriman	9.228.136	8.542.783
Chemical laundry	6.837.500	15.786.800
Jumlah	4.987.831.971	5.388.720.036

22. BEBAN USAHA

Akun ini terdiri dari:

	2020	2019
Beban pemasaran		
Komisi & compliment	92.741.375	116.245.752
Iklan dan promosi	21.381.500	107.393.539
Beban umum dan administrasi		
Karyawan		
Gaji	2.655.768.835	3.196.919.228
Tunjangan hari raya	261.297.083	231.105.831
BPJS dan jamsostek	237.738.763	349.126.298
Makan dan catering	100.706.600	290.288.100
Upah	20.123.500	65.331.522
Tunjangan	19.357.300	62.131.600
Pengobatan	17.639.511	13.444.500
Seragam	1.130.000	61.445.000
Lainnya	8.252.900	22.086.171
Penyusutan	1.430.981.419	1.288.070.673
Imbalan pasca kerja	665.491.735	104.393.797
Profesional fee	361.681.818	519.946.000
Beban pajak	307.334.653	83.069.872
Peralatan dan perlengkapan	190.431.576	305.581.881
Cetakan	128.902.075	51.674.510
Iuran	116.000.000	7.500.000
Asuransi	69.747.360	33.062.398
Program STAAH	64.732.735	59.453.214
Transportasi	43.903.098	20.284.000
Konsultan pajak	41.000.000	23.000.000
Perijinan	35.050.000	28.850.000
Donasi dan sumbangan	20.261.800	39.279.634
ATK dan materai	19.072.479	32.481.700
RUPS	18.900.000	-
Sewa	12.609.760	92.579.847
Jamuan	10.987.187	24.114.912
Service dan perawatan	10.406.109	23.630.314
Perjalanan dinas	7.083.000	51.249.301
Keamanan dan kebersihan	5.500.000	6.342.000
Representasi	5.400.000	24.100.000
Pendaftaran	720.000	-
Buket bunga	605.000	2.295.000
Lain-lain	2.984.900	17.241.671
Jumlah	7.005.924.071	7.353.718.265

23. TAKSIRAN PAJAK PENGHASILAN

Pajak kini

Rekonsilisasi antara laba (rugi) komersial yang disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasi dan taksiran laba menurut fiskal adalah sebagai berikut:

Akun ini terdiri dari:

	2020	2019
Rugi sebelum pajak penghasilan menurut laba rugi	(8.682.541.781)	(6.156.393.609)
Yang tidak dapat diperhitungkan menurut fiskal:		
Beda waktu		
Beban imbalan pasca kerja	665.491.735	104.393.797
Beda tetap		
Representasi	5.400.000	24.100.000
Sumbangan	20.261.800	39.279.634
Beban pajak	305.894.653	83.069.872
Jamuan	10.987.187	20.161.712
Bunga jasa giro	(14.696.649)	(73.492.649)
Rugi fiskal	(7.689.203.055)	(5.958.881.243)
Rugi fiskal tahun sebelumnya	(19.502.105.712)	(13.543.224.469)
Akumulasi rugi fiskal	(27.191.308.767)	(19.502.105.712)

Akumulasi rugi fiskal	2020	2019
Perusahaan	(3.137.087.936)	(1.942.852.736)
Entitas anak		
PT Bumi Majalengka permai	(23.799.847.609)	(17.334.792.654)
PT Fitra Amanah Wisata	(254.373.222)	(224.460.322)
Jumlah	(27.191.308.767)	(19.502.105.712)

Perhitungan pajak penghasilan badan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 diatas menjadi dasar penyusunan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan Badan.

Aset pajak tangguhan

	1 Januari 2020	Diakui dalam laba rugi	Diakui dalam penghasilan komprehensif lain	31 Desember 2020
Perusahaan				
Liabilitas imbalan kerja	9.222.429	48.407.164	465.673	58.095.265
Penyesuaian tarif pajak	-	(1.050.360)	(56.332)	(1.106.691)
Entitas anak				
Liabilitas imbalan kerja	45.091.028	98.001.018	9.582.048	152.674.094
Penyesuaian tarif pajak	-	(5.076.382)	(334.541)	(5.410.923)
Jumlah	54.313.457	140.281.440	9.656.848	204.251.744

23. TAKSIRAN PAJAK PENGHASILAN

Aset pajak tangguhan (lanjutan)

	1 Januari 2019	Diakui dalam laba rugi	Diakui dalam penghasilan komprehensif lain	31 Desember 2019
Perusahaan				
Liabilitas imbalan kerja	2.364.059	6.388.939	469.432	9.222.429
Entitas anak				
Liabilitas imbalan kerja	22.593.673	19.709.511	2.787.844	45.091.028
Jumlah	24.957.732	26.098.449	3.257.275	54.313.457

24. LABA PER SAHAM DASAR

Perhitungan laba per saham dasar adalah sebagai berikut:

	2020	2019
Nilai nominal semula	100	100
Niali nominal yang disajikan kembali	100	100
Rata-rata tertimbang dari jumlah saham untuk untuk perhitungan laba (rugi) dasar per saham semula	600.000.000	581.666.667
Rata-rata tertimbang dari jumlah saham untuk perhitungan laba (rugi) dasar per saham yang disajikan kembali	600.000.000	581.666.667
Rugi bersih entitas induk	(8.578.249.949)	(6.140.038.614)
Rugi per saham	(14,30)	(10,56)

25. NILAI WAJAR ASET KEUANGAN DAN LIABILITAS KEUANGAN

Tabel di bawah ini menyajikan perbandingan atas nilai tercatat dengan nilai wajar dari instrumen keuangan Entitas yang tercatat dalam laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

	2020		2019	
	Nilai tercatat	Nilai wajar	Nilai tercatat	Nilai wajar
Aset keuangan				
Kas dan setara kas	1.681.806.191	1.681.806.191	2.971.233.553	2.971.233.553
Piutang usaha	259.710.717	259.710.717	687.823.409	687.823.409
Piutang lain-lain	-	-	5.560.000	5.560.000
Jumlah	1.941.516.908	1.941.516.908	3.664.616.962	3.664.616.962
Liabilitas keuangan				
Utang usaha	1.236.173.633	1.236.173.633	124.719.369	124.719.369
Biaya yang masih harus dibay	1.092.347.277	1.092.347.277	916.219.676	916.219.676
Utang lain-lain	1.488.768.289	1.488.768.289	79.892.732	79.892.732
Utang pemegang saham	1.000.000.000	1.000.000.000	-	-
Utang sewa pembiayaan	175.952.783	175.952.783	403.744.333	403.744.333
Utang bank	26.413.100.000	26.413.100.000	21.171.500.000	21.171.500.000
Jumlah	31.406.341.982	31.406.341.982	22.696.076.110	22.696.076.110

26. PERJANJIAN PENTING

a. Perjanjian Kerjasama Merchant Internet No. 85/PKS-M/XI/2017 Tanggal 9 November 2017 yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup oleh dan antara PT Midtrans sebagai Payment Gateway dengan PT Bumi Majalengka Permai Merchant.

b. Perjanjian Partisipasi Properti Akomodasi dengan Agoda 7 Juli 2017 oleh dan antara Agoda Pte, Ltd dibuat dibawah tangan oleh Agoda sebagai Agoda dan PT Bumi Majalengka Permai sebagai Hotel

c. Perjanjian Akomodasi dengan Booking.com B.V. tanggal 7 Juli 2017 dibuat dibawah tangan antara Booking.com B.V. sebagai Booking.com dan PT Bumi Majalengka Permai sebagai Hotel.

d. Lodging Contract tanggal 7 Desember 2017 dibuat dibawah tangan oleh Expedia sebagai Expedia dan PT Bumi Majalengka Permai sebagai Hotel.

e. Perjanjian Pelayanan Pemesanan Hotel tanggal 26 Juni 2017 dibuat dibawah tangan antara PT Go Online Destinations (pegipegi.com) sebagai Pihak Pertama dan PT Bumi Majalengka Permai sebagai Pihak Kedua.

f. Perjanjian Kerjasama Hotel dengan Traveloka tanggal 19 September 2017 dibuat dibawah tangan antara Traveloka Services Pte. Ltd. sebagai Traveloka dan PT Bumi Majalengka Permai sebagai Hotel.

g. Perjanjian Pembelian dan Pemeliharaan Emerald System No. HTL/17/04/0009 tanggal 3 April 2017 antara PT Bumi Majalengka Permai Pihak Pertama dengan Emerald System Pihak Kedua yang mana perjanjian tersebut di perpanjang sesuai dengan Kontrak Pemeliharaan Piranti Lunak Emerald System No. MNT/2018/04/0006 tanggal 1 Juni 2018.

h. Perjanjian Kerjasama antara PT Bumi Majalengka Permai sebagai Pihak Pertama dengan PT Adipramana Multi Dinamika Pihak Kedua tanggal 30 Oktober 2018 untuk Program promosi dan pemasaran oleh Pihak Kedua untuk Pihak Pertama.

i. Perjanjian Kerjasama dibawah tangan No. 01/XI/PKS/2018 tanggal 17 November 2018 antara PT Bumi Majalengka Permai sebagai pihak pertama dan Association of The Indonesian Tours & Travel Agencies (ASITA) DPC Kerjasama penjualan package room hotel dan room meeting, penjualan package perjalanan wisata untuk pelanggan hotel, penyediaan kendaraan penjemputan pelanggan hotel dan taksi hotel.

j. Perjanjian Kerjasama dibawah tangan bermaterai cukup No. 005/GM/GM-FHMMJL/IX/2019 tanggal 11 Januari 2019 antara PT Bumi Majalengka Permai sebagai Pihak Hotel dan PT Citilink Indonesia sebagai Pihak Tamu untuk Kerjasama penjualan paket kamar hotel dan meeting room.

k. Perjanjian Kerjasama dibawah tangan bermaterai cukup No. 005/GM/GM-FHMMJL/IX/2019 tanggal 11 Januari 2019 antara PT Bumi Majalengka Permai sebagai pihak pertama dan PT Garuda Indonesia untuk Kerjasama penjualan package room hotel dan room meeting.

l. Perjanjian Kerjasama dibawah tangan bermaterai cukup No. 310/JT-DZ/PKSH/KJT/X/2018 tanggal 11 Oktober 2018 antara PT Lion Mentari sebagai pihak pertama dan PT Bumi Majalengka Permai untuk Kerjasama dalam penyediaan kamar oleh Pihak Kedua bagi Pihak Pertama.

m. Perjanjian Kerjasama dibawah tangan bermaterai cukup No. 003/GM/GM-FHMMJL/XII/2018 tanggal 20 Desember 2018 antara PT Bumi Majalengka Permai sebagai pihak pertama dan Menara Islam untuk Kerjasama dalam penyediaan kamar oleh Pihak Pertama bagi Pihak Kedua.

n. Perjanjian Kerjasama dibawah tangan bermaterai cukup No. 004/GM/GM-FHMMJL/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018 antara PT Bumi Majalengka Permai sebagai pihak pertama dan Sampoerna untuk Kerjasama dalam penyediaan kamar oleh Pihak Pertama bagi Pihak Kedua.

o. Perjanjian Kerjasama dibawah tangan bermaterai cukup No. 005/GM/GM-FHMMJL/XII/2018 tanggal 9 Januari 2019 antara PT Bumi Majalengka Permai sebagai pihak pertama dan Menara Islam Kerjasama dalam penyediaan kamar oleh Pihak Pertama bagi Pihak Kedua.

27. INFORMASI SEGMEN

Segmen Operasi

Manajemen memantau hasil operasi dari unit usahanya secara terpisah guna keperluan pengambilan keputusan mengenai alokasi sumber daya dan penilaian kinerja. Kinerja segmen dievaluasi berdasarkan laba atau rugi operasi dan diukur secara konsisten dengan laba atau rugi operasi pada laporan keuangan konsolidasian. Namun, pendanaan (termasuk biaya pendanaan dan pendapatan pendanaan) dan pajak penghasilan Entitas dikelola secara Kelompok Usaha dan tidak dialokasikan kepada segmen operasi.

	2020	2019
Pendapatan usaha		
Hotel	2.667.927.633	5.268.984.025
Breakfast	1.038.182.463	1.915.919.343
Banquet	1.237.744.394	1.157.332.002
Food & beverage	309.725.491	663.702.851
Laundry	72.478.721	196.682.003
Transportasi	49.907.902	166.002.917
Lainnya	21.402.500	115.898.306
Jumlah	5.397.369.104	9.484.521.447
Beban yang dapat dialokasikan		
Hotel	12.802.387.794	14.196.376.696
Breakfast	478.017.758	709.236.682
Banquet	334.612.431	496.465.677
Food & beverage	143.405.327	212.771.005
Laundry	6.837.500	15.786.800
Beban yang tidak dapat dialokasikan		
Lainnya	339.650.075	10.278.196
Jumlah	14.104.910.885	15.640.915.056
Rugi sebelum pajak penghasilan	(8.707.541.781)	(6.156.393.609)
Pajak penghasilan		
Pajak kini	-	-
Pajak tangguhan	140.281.440	26.098.449
Rugi bersih tahun berjalan	(8.567.260.341)	(6.130.295.160)
Penghasilan (rugi) komprehensif lain		
Pengukuran kembali imbalan pasti	(45.671.459)	(13.029.101)
Pajak atas penghasilan terkait	9.656.848	3.257.275
Rugi komprehensif tahun berjalan	(8.603.274.952)	(6.140.066.986)

	2020	2019
Laba kotor		
Hotel	(1.017.381.247)	1.324.802.349
Breakfast	560.164.704	1.206.682.661
Banquet	903.131.963	660.866.325
Food & beverage	166.320.164	450.931.846
Transportasi	49.907.902	166.002.917
Laundry	65.641.221	180.895.203
Lainnya	(318.247.574)	105.620.110
Jumlah	409.537.133	4.095.801.411

27. INFORMASI SEGMEN (Lanjutan)

Segmen Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

	2020	2019
Jumlah aset		
Hotel	61.534.030.944	60.753.442.934
Breakfast	28.467.851	38.235.486
Banquet	12.200.509	16.386.637
Food & beverage	4.960.489	11.624.195
Laundry	5.386.144	19.000.000
Jumlah	61.585.045.937	60.838.689.252
Jumlah liabilitas		
Hotel	32.393.495.681	23.068.864.044
Breakfast	-	-
Banquet	-	-
Food & beverage	-	-
Transportasi	-	-
Laundry	-	-
Jumlah	32.393.495.681	23.068.864.044

28. SALDO DAN SIFAT TRANSAKSI SIGNIFIKAN DENGAN PIHAK BERELASI

Dalam kegiatan usaha normal, Perusahaan melakukan transaksi yang berkelanjutan dengan pihak berelasi.

Transaksi pihak berelasi

Dalam kegiatan usahanya untuk menunjang kegiatan operasional Perseroan, Grup melakukan transaksi berdasarkan persyaratan yang disepakati bersama dengan pihak-pihak berelasi, tidak ada transaksi yang tidak berhubungan dengan kegiatan usaha utama.

Sifat transaksi dan hubungan pihak berelasi

- Jon Fieris merupakan pemegang saham Perusahaan,

29. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Direksi memiliki tanggungjawab keseluruhan untuk menetapkan dan mengawasi kerangka manajemen risiko. Direksi telah menetapkan fungsi keuangan yang bertanggungjawab untuk mengelola, mengembangkan dan memantau kebijakan manajemen risiko Perusahaan. Sedangkan fungsi internal audit memiliki tanggungjawab untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas kebijakan dan prosedur manajemen risiko, dan menelaah kecukupan risiko yang dihadapi oleh Perusahaan dengan memberikan laporannya kepada Direksi. Tujuan keseluruhan dari manajemen risiko adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisa risiko - risiko yang dihadapi Perusahaan, menetapkan batasan risiko dan pengendalian yang sesuai, serta untuk mengawasi risiko dan kepatuhan terhadap batasan yang telah ditetapkan, namun tanpa terlalu mempengaruhi daya saing Perusahaan dan fleksibilitas.

29. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

Risiko kredit

Risiko kredit adalah risiko jika pihak debitur tidak memenuhi kewajibannya yang menyebabkan kerugian keuangan. Perusahaan melakukan analisa dan persetujuan kredit yang hati-hati, dan juga pengawasan terhadap saldo piutang dilakukan secara berkesinambungan untuk meminimalisasi piutang yang tidak dapat ditagih. Terkait dengan kredit yang diberikan kepada pelanggan, Perusahaan mengendalikan eksposur risiko kredit dengan menetapkan kebijakan atas persetujuan atau penolakan kontrak kredit baru. Kepatuhan atas kebijakan tersebut dipantau oleh Direksi. Sebagai bagian dari proses dalam persetujuan atau penolakan tersebut, reputasi dan jejak rekam pelanggan menjadi bahan pertimbangan. Saat ini, tidak terdapat risiko kredit yang terkonsentrasi secara signifikan.

Pada tanggal pelaporan, eksposur maksimum Perusahaan terhadap risiko kredit adalah sebesar nilai tercatat masing-masing kategori aset keuangan yang disajikan pada laporan posisi keuangan.

	2020	2019
Kas dan setara kas	1.681.806.191	2.971.233.553
Piutang usaha	259.710.717	687.823.409
Jumlah	1.941.516.908	3.659.056.962

Risiko likuiditas

Pada saat ini Perusahaan berharap dapat membayar semua liabilitas pada saat jatuh tempo. Perusahaan melakukan evaluasi dan pengawasan yang ketat atas arus kas masuk dan kas keluar untuk memastikan tersedianya dana untuk memenuhi kebutuhan pembayaran liabilitas yang jatuh tempo. Secara umum, kebutuhan dana untuk pelunasan liabilitas jangka pendek yang jatuh tempo diperoleh dari pelunasan piutang dari pelanggan yang memiliki jangka waktu kredit 3 bulan.

Tabel berikut menganalisis liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi berdasarkan sisa umur jatuh temponya:

	2020		
	Kurang dari satu tahun	Lebih dari satu tahun	Jumlah
Liabilitas keuangan			
Utang usaha	1.236.173.633	-	1.236.173.633
Utang lain-lain	1.488.768.289	-	1.488.768.289
Biaya yang masih harus dibayar	1.092.347.277	-	1.092.347.277
Utang bank	2.700.000.000	23.713.100.000	26.413.100.000
Utang sewa pembiayaan	167.095.839	8.856.944	175.952.783
Utang pemegang saham	1.000.000.000	-	1.000.000.000
Jumlah	7.684.385.038	23.721.956.944	31.406.341.982

Risiko operasional

Risiko operasional adalah risiko kerugian yang diakibatkan oleh kekurangan atau kegagalan dari proses internal, faktor manusia dan sistem atau dari kejadian-kejadian eksternal. Risiko ini melekat dalam semua proses bisinis, kegiatan operasional, sistem dan produk Perusahaan.

29. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

Risiko operasional (lanjutan)

Kebijakan manajemen yaitu menerapkan sistem audit kepatuhan yang berkelanjutan, pemeliharaan ataupun melakukan backup atas aplikasi utama perusahaan baik dari sisi hardware dan software untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, dan juga menanamkan nilai-nilai dasar Perusahaan sejak dini kepada karyawan sehingga dapat menghindarikan/mengurangi potensi penyimpangan, serta penilaian kinerja yang fair dan transparan dalam pengembangan karir.

Risiko permodalan

Kebijakan manajemen adalah mempertahankan secara konsisten struktur permodalan yang sehat dalam jangka panjang guna mempertahankan akses terhadap berbagai alternative pendanaan pada biaya yang wajar. Tujuan utama pengelolaan modal Perusahaan adalah untuk memastikan pemeliharaan rasio modal yang sehat antara jumlah liabilitas dan ekuitas guna mendukung usaha dan memaksimalkan imbalan bagi pemegang saham.

Perusahaan mengelola dan melakukan penyesuaian terhadap struktur permodalan berdasarkan perubahan kondisi ekonomi. Dalam rangka pemeliharaan dan mengelola struktur permodalan, Perusahaan mempertimbangkan efisiensi penggunaan modal berdasarkan arus kas operasi dan belanja modal serta mempertimbangkan kebutuhan modal dimasa yang akan datang.

30. TRANSAKSI NON-KAS

Pada tahun yang berakhir 31 Desember 2019, Perusahaan melakukan transaksi investasi dan pendanaan yang tidak memerlukan penggunaan kas dan tidak termasuk dalam laporan arus kas berupa sewa pembiayaan sebesar Rp527.350.000.

31. SALDO DEFISIT

Laporan keuangan konsolidasian disusun dengan anggapan Perusahaan dan entitas anaknya akan melanjutkan usahanya secara berkesinambungan dan tidak mencakup adanya penyesuaian sebagai akibat adanya ketidakpastian tentang kelangsungan hidup Perusahaan dan entitas anaknya. Perusahaan dan entitas anaknya mengalami defisit pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp19.624.908.926. Manajemen berkeyakinan bahwa Perusahaan dan entitas anaknya ditahun-tahun yang akan datang akan memperoleh laba yang signifikan karena memiliki sumber daya yang memadai untuk melanjutkan kegiatan usahanya. Oleh karena itu, dasar kelangsungan usaha tetap digunakan sebagai dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian.

Berikut adalah langkah-langkah yang akan dilakuakan Manajemen untuk mempertahankan kelangsungan usahanya di tahun 2021 sebagai tindak lanjut dari Perencanaan Manajemen, antara lain:

- Melakukan efisiensi dan penghematan biaya disemua departemen.
- Memaksimalkan penyewaan convention hall, kami berkeyakinan akan dapat meningkatkan pendapatan Perseroan terutama dari penyewaan ruangan rapat dan weeding dengan tetap mematuhi protokol kesehatan.
- Memaksimalkan kerja dari team Marketing untuk terus menjalin kerjasama dengan customer yang telah melakukan kerjasama dengan Perseroan dan akan terus mencari customer baru dengan melakukan kerjasama denga event organizer untuk pemasaran paket weeding, bazaar, pameran dan event-event lainnya.
- Terus berusaha memberikan pelayanan yang prima kepada pelanggan agar pelanggan merasa nyaman menginap di Hotel Fitra.

32. KETIDAKPASTIAN KONDISI EKONOMI

Timbulnya COVID-19 sejak awal tahun 2020 berdampak pada kegiatan operasional Perusahaan sampai saat ini. Manajemen Perusahaan akan meninjau situasi secara berkelanjutan atas operasi, likuiditas dan sumber daya yang dimiliki Perusahaan, serta berusaha meminimalkan kemungkinan dampak yang akan terjadi dimasa depan yang dapat mempengaruhi bisnis Perusahaan. Dikarenakan atas terus berkembangnya situasi ini, dampak sepenuhnya dari penyebaran COVID-19 masih menjadi ketidak pastian dan belum dapat ditentukan.

33. TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Manajemen Entitas Induk, yang diwakili oleh Direksi, bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan konsolidasian ini yang telah diselesaikan dan diotorisasi untuk diterbitkan oleh manajemen Entitas Induk pada tanggal 23 April 2021.